

Penghargaan Media Digital OJK

Media publikasi digital OJK meraih penghargaan
Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025,
dengan kategori berikut:



SILVER WINNER

Kategori Best
Website Government

www.ojk.go.id

SILVER WINNER

Kategori Best
E-Magazine Government

Majalah Edukasi Konsumen

BRONZE WINNER

Kategori Best
Government Social Media

SikapiUangmu

5 Kabar Otoritas

Edukasi Hari Pendidikan Nasional bersama Komisi XI DPR

- 20 Edu Perbankan
Pemanfaatan Kecerdasan Artificial di Sektor Perbankan
- 22 Edu Invest
Menenal Pasar Derivatif Keuangan Indonesia
- 24 Edu IKNB
Kolaborasi Multisektor Dorong Pertumbuhan Asuransi Syariah
- 26 Edu Syariah
Optimalkan Peran Ibu sebagai Duta Literasi melalui Program SICANTIKS
- 28 Edu Tech
Komputasi Awan dalam Sektor Jasa Keuangan
- 32 Sosok
Arief Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) **PNM Bersama OJK Dorong Peningkatan Literasi Keuangan Usaha Mikro**
- 34 Regulasi
OJK Terbitkan POJK Terbaru untuk Bank Kustodian dan SEOJK untuk BPR
- 36 Bisnis Pemula
Raup Cuan dari Jual Produk Digital
- 38 Investasi
Fenomena Konsumen Borong Emas, Investasi Emas Masih Relevan atau Tidak?
- 40 Konsumen Bicara
Konsumen Tanya Premi Asuransi
- 41 Telaah Produk
Manfaatkan Kartu Kredit untuk Atur Keuanganmu
- 43 Angka Bicara
Perkembangan Bursa Karbon Sepanjang 2024
- 44 Inspirasi
Manfaat Anjak Piutang Sebagai Solusi Pendanaan
- 46 Wacana
Urgensi Sertifikasi bagi Bisnis UMKM
- 48 Literasi Keuanganpedia
Waspada Jerat Paylater, Belajar dari Novel "Pay Sooner or Later"
- 49 Kuis Sikapi Uangmu
- 50 Silam Kini
Menenal Museum Pegadaian di Indonesia

10 Sorotan Utama II

Edukasi Keuangan OJK dalam Rangka Perayaan Hari Kartini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Perayaan Hari Kartini dengan kegiatan edukasi keuangan bagi perempuan pekerja migran Indonesia, penyandang disabilitas perempuan, dan seluruh perempuan Indonesia cerdas, berdaya, dan berintegritas.



18 Perspektif

Wajah Baru Layanan Digital OJK

OJK mentransformasi sistem layanan digitalnya dengan meluncurkan portal data dan metadata sektor jasa keuangan menjadi lebih terintegrasi.

6 Sorotan Utama I

OJK Rilis Hasil SNLIK 2025, Meningkat Dibanding 2024

OJK merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Hasilnya, indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2024 sebesar 66,46%, meningkat dibanding indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2023 sebesar 65,43%.

14 Sorotan Utama III

OJK Melaksanakan Rangkaian Program GENCARKAN 2025

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program GENCARKAN 2025 meluncurkan Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang akan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025.



30 Fokus Global

Efek Domino Tarif Trump, Ancaman atau Peluang?

Pengaruh kebijakan tarif dagang Amerika Serikat yang ditetapkan Donald Trump telah berdampak besar terhadap perekonomian global. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah efek domino dari kebijakan tarif Trump tersebut menjadi ancaman bagi ekonomi Indonesia, atau justru peluang yang menguntungkan?

Lewat GENCARKAN, OJK Targetkan Masyarakat Semakin Cakap Finansial

Sadar akan pentingnya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan Literasi dan Inklusi Keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) secara berkelanjutan.

Hasilnya terlihat pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik. Indeks literasi keuangan nasional 65,43% pada 2024 menjadi 66,46% pada 2025. Sementara indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,02% pada 2024 menjadi 80,51% pada 2025.

SNLIK merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan OJK untuk memetakan keadaan terkini tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil survei ini menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke depannya. SNLIK juga menjadi acuan OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Sebelumnya, memperingati Hari Kartini, pada 21 April 2025 OJK bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Perayaan Hari Kartini dengan kegiatan Edukasi Keuangan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan edukasi bertema "Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial Menyongsong Masa Depan Sejahtera" ini diikuti oleh sekitar 1.000 pekerja migran Indonesia (PMI).

Kantor OJK Daerah (KOD) juga menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025. OJK Provinsi Jawa Timur menggelar *Training of Trainers (ToT)* Duta Literasi Keuangan kepada mahasiswa di wilayah Surabaya Raya dengan tema "Masa Depan Sejahtera dengan Perencanaan Keuangan" di Kantor OJK Jatim pada 26 Mei 2025.

Di Jawa Tengah, OJK menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bertema "Generasi Muda Melek Finansial, Wujudkan Masa Depan Sejahtera di Era Digital" di Auditorium Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS), Kabupaten Brebes. Kegiatan dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Roby Setiadi, Wakil Bupati Brebes Wurja beserta pimpinan industri jasa keuangan. Kegiatan juga diikuti 500 lebih mahasiswa UMUS secara tatap muka serta 2.314 mahasiswa Universitas Panca Sakti dan mahasiswa lainnya secara daring.

Sebagai program baru OJK, rangkaian kegiatan BLK dilaksanakan mulai Mei hingga Agustus 2025 antara lain *financial literacy series*, *financial literacy campaign* dan *financial literacy award*. Dalam rangka mewujudkan *multiplier effect* literasi keuangan, OJK membentuk OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan).

OJK juga menggelar GENCARKAN & *Youngpreneur Summit* 2025 serta *Syariah Financial Fair* (SYAFIF) Goes to Palembang. KE PEPK OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. "Mahasiswa dan generasi muda merupakan salah satu dari 10 segmen yang kita prioritaskan dalam memberikan edukasi dan literasi," kata Friderica. Kegiatan sinergi oleh OJK diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

SUSUNAN REDAKSI

DEWAN PELINDUNG:

Mahendra Siregar
(Ketua Dewan Komisiner OJK)

DEWAN PENASEHAT:

Friderica Widyasari Dewi (Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen),
Rizal Ramadhani (Deputi Komisiner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen)

PEMIMPIN UMUM /PEMIMPIN REDAKSI:

Mohammad Ismail Riyadi (Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah selaku Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi),
Rudy Agus P. Raharjo (Kepala Departemen Pelindungan Konsumen)

REDAKTUR AHLI:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan),
Sekar Putih Djarot (Kepala Grup Komunikasi Publik); Sabar Wahyono (Direktur Pelayanan Konsumen, Pemeriksaan Pengaduan dan EPK Regional), Rony Ukurta Barus (Direktur Inklusi Keuangan), Tri Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum Pelindungan Konsumen), Reli Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK),

REDAKTUR:

Cecep Setiawan (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan)

REDAKSI:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

ALAMAT REDAKSI:

Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK
Jl. Lap. Banteng Timur No. 2-4,
Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710
Telepon: (021) 29600000
Faksimili: (021) 3866032
Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada *minisite* OJK: sikapiuangmu.ojk.go.id

Edukasi Hari Pendidikan Nasional bersama Komisi XI DPR

Bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), OJK bersama Komisi XI DPR RI menggelar sejumlah kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat dapat mengelola keuangan secara lebih bijak dan cerdas.

Mengemban tugas penting yakni memastikan pendidikan yang adil dan merata serta bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, OJK bersama dengan Komisi XI DPR RI memberikan edukasi terkait pemahaman keuangan. Hal ini sejalan dengan program yang sudah dijalankan OJK yakni Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

Selama bulan Mei 2025 yang bertepatan dengan dimulainya Bulan Literasi Keuangan (BLK), OJK bersama Komisi XI DPR menggelar sejumlah rangkaian kegiatan literasi yang menasar generasi muda, pelaku usaha, hingga komunitas perempuan, salah satunya antara lain

edukasi keuangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Malang dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Di Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes dan Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, OJK juga menggelar program *Kick Off* Bulan Literasi Keuangan pada 22 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, turut dikukuhkan duta literasi keuangan dari kalangan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman keuangan di lingkungan kampus.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK OJK), Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. "Mahasiswa dan generasi muda merupakan salah satu dari sepuluh segmen yang kita prioritaskan dalam memberikan edukasi dan literasi," kata Friderica.

Berikutnya, OJK bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan Pemda Karanganyar menggelar edukasi keuangan bagi kaum muda Solo Raya pada 23 Mei 2025. Kegiatan ini juga mengukuhkan duta literasi dari kalangan pegawai Bank Jateng untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan ke masyarakat akar rumput.

OJK juga menggelar Sumsel GENCARKAN & Youngpreneur Summit 2025 pada 16 Mei. Kegiatan ini menasar kalangan muda untuk menjadi "Sultan Muda" dengan mendorong literasi finansial dan semangat kewirausahaan. Melalui kegiatan literasi ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan pribadi sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri secara finansial.





OJK Rilis Hasil SNLIK Tahun 2025, Meningkat Dibanding 2024

OJK merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Hasilnya, indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2024 sebesar 66,46%, meningkat dibanding indeks literasi keuangan nasional pada tahun 2023 sebesar 65,43%.

OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil SNLIK Tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

SNLIK merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan OJK untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan

masyarakat Indonesia. Karena itulah hasil survei ini menjadi landasan program OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ke depannya. SNLIK juga dijadikan acuan bagi OJK dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK OJK), Friderica Widyasari Dewi dan Deputy Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta.

OJK menggandeng BPS untuk menggelar SNLIK Tahun 2025 ini untuk mendapatkan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan Indonesia dari dua sudut pandang. Dengan demikian OJK dapat mengetahui evaluasi pada pelaksanaan SNLIK sebelumnya sekaligus dijadikan kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional

Kuungan Inklusif (DNKI) dengan lebih komprehensif.

Adapun pendataan sampel pada SNLIK 2025 ini dilakukan mulai 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi yang mencakup 120 kota/kabupaten termasuk 8 wilayah kantor OJK dengan blok sensus sejumlah 1.080. Jumlah respondennya mencapai 10.745 orang yang berusia antara 15 tahun sampai 79 tahun.

Metode Sampling

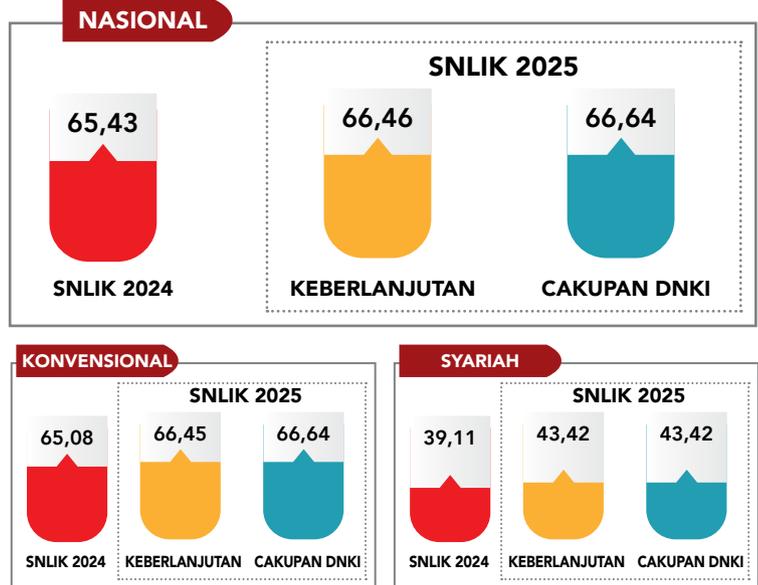
Untuk memperoleh sampel dalam melakukan survei ini, OJK dan BPS menggunakan metode *stratified multistage cluster sampling*, yakni

teknik pengambilan sampel yang menggabungkan tiga metode: *stratified sampling*, *multistage sampling*, dan *cluster sampling*. *Stratified sampling* membagi populasi menjadi strata (kelompok) berdasarkan karakteristik tertentu. *Multistage sampling* melakukan pengambilan sampel dalam beberapa tahap. *Cluster sampling* membagi populasi menjadi kelompok (*cluster*) dan kemudian mengambil sampel dari beberapa *cluster* tersebut.

Sementara itu untuk parameter yang digunakan dalam penghitungan indeks literasi keuangan terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku,

“ Kami mencatat tingkat literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46% pada 2025, dari pencapaian pada 2024 yang sebesar 65,43%. Dan, indeks inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 80,51% pada 2025, dari 75,02% pada 2024, kata Friderica.

**HASIL SNLIK TAHUN 2025
INDEKS LITERASI KEUANGAN (PERSEN)**



sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan keuangan.

Metode Keberlanjutan dan Metode Cakupan DNKI

Lalu, untuk sektor jasa keuangan yang diukur tahun ini, OJK menyajikan indeks literasi dan inklusi keuangan dalam dua metode. Pertama metode Keberlanjutan dan kedua adalah metode Cakupan DNKI. Metode yang pertama adalah metode yang sudah biasa digunakan OJK selama ini, dengan mengambil data dari sembilan sektor jasa keuangan yakni perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, lembaga keuangan mikro, *fintech lending* (pinjaman daring/pindar), Permodalan Nasional Madani, dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP).

Untuk metode yang kedua merupakan metode yang baru diterapkan tahun ini yakni dengan memperluas cakupan perhitungannya,

OJK menambahkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga keuangan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, penyelenggara perdagangan aset kripto, dan Pos Indonesia. Kian meluas dan beragamnya sektor jasa keuangan, tentu pertimbangan untuk menambahkan cakupan perhitungan berdasarkan DNKI sangat diperlukan, sehingga OJK dapat menampilkan hasil yang lebih akurat dan menyeluruh.

Hasil SNLIK 2025

Friderica mengatakan tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat dibandingkan hasil survei 2024. "Kami mencatat tingkat literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46% pada 2025, dari pencapaian pada 2024 yang sebesar 65,43%. Dan, indeks inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 80,51% pada 2025, dari 75,02% pada 2024," kata Friderica.

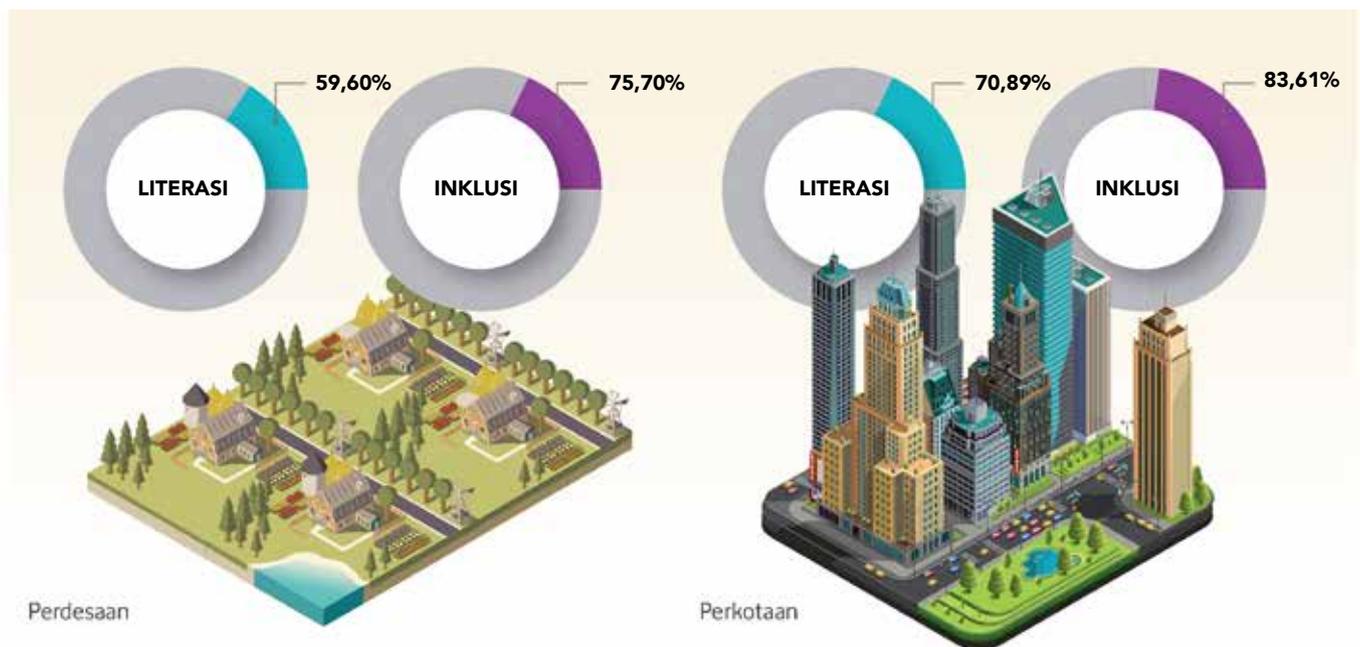
Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar

70,89% dan 83,61%, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,60% dan 75,70%.

Lalu, berdasarkan gender, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan adalah masing-masing sebesar 67,32% dan 65,58%. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, yakni masing-masing 80,73% dan 80,28%.

Pada kelompok umur, indeks literasi keuangan terendah ada di kelompok umur 15-17 tahun. Sedangkan tertingginya di kelompok umur 36-50 tahun. Untuk indeks inklusi keuangan, terendah tercatat pada kelompok umur 51-79 tahun dan tertinggi pada kelompok umur 18-25 tahun.

Kemudian, hasil survei berdasarkan latar belakang, tercatat indeks literasi tertinggi ada pada kelompok masyarakat dengan latar belakang tamatan perguruan tinggi sebesar 90,63%. Hasil yang sama juga terjadi



PERBANDINGAN INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN KLASIFIKASI DESA

pada indeks inklusi keuangan, tercatat ada pada tamatan perguruan tinggi sebesar 99,1%. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks literasi dan inklusi keuangan.

Lebih lanjut, jika diukur dari latar belakang pekerjaan/kegiatan sehari-harinya, kelompok pegawai/profesional mendapatkan indeks literasi tertinggi yakni 85,8%. Sedangkan indeks literasi terendah ada pada golongan

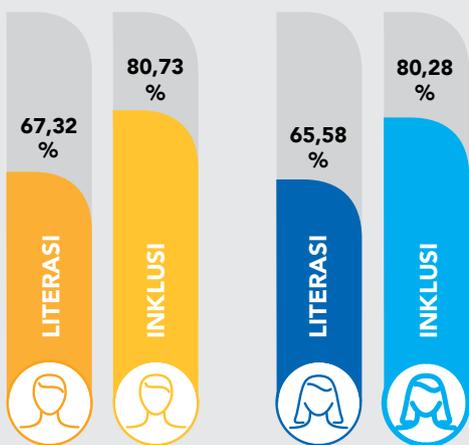
masyarakat tidak bekerja sebesar 49,3%. Hasil menarik terjadi pada indeks inklusi keuangan, yakni golongan pensiunan/purnawirawan mencapai angka tertinggi yakni 100% dan terendahnya ada pada golongan masyarakat tidak bekerja sebesar 64,82%. Selanjutnya indeks literasi dan inklusi keuangan dapat dilihat dalam tampilan info grafis.

Hasil SNLIK 2025 ini dapat terlihat *gap* antara literasi dan inklusi semakin mengecil. Tahun 2022 silam, terdapat

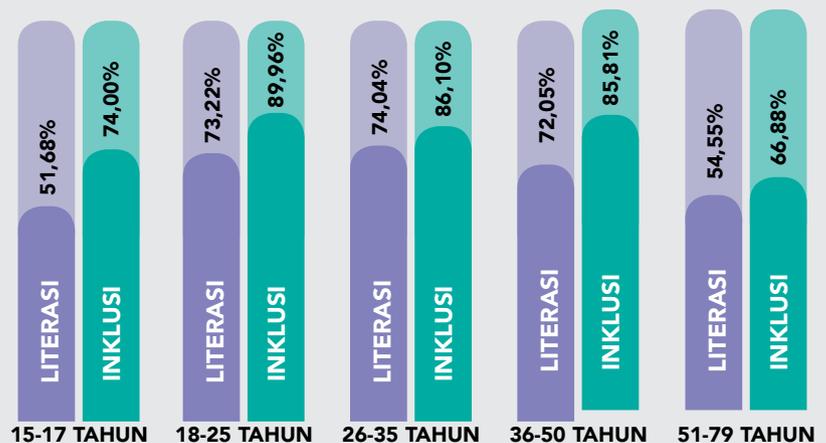
gap sebesar 35,42%, sementara tahun ini menjadi 14,05%. Ini berarti masyarakat mulai memahami produk dan layanan keuangan yang mereka pakai.

Namun, OJK tetap akan terus berupaya memperkecil *gap* yang ada dengan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat, khususnya pada indeks yang mendapat angka terendah. Upaya OJK ini tentu tidak lepas dari kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

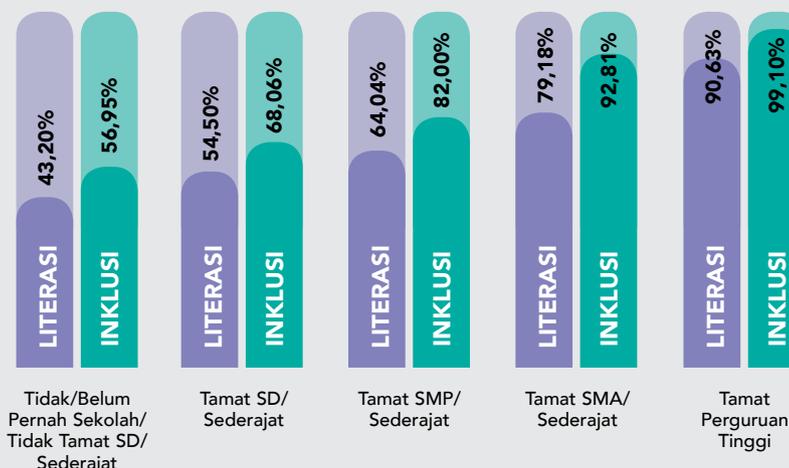
PERBANDINGAN INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN/GENDER



PERBANDINGAN INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR



PERBANDINGAN INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN





Edukasi Keuangan OJK dalam Rangka Perayaan Hari Kartini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Perayaan Hari Kartini dengan kegiatan edukasi keuangan bagi perempuan pekerja migran Indonesia, penyandang disabilitas perempuan, dan seluruh perempuan Indonesia cerdas, berdaya, dan berintegritas.

OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Perayaan Hari Kartini dengan kegiatan Edukasi Keuangan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan edukasi bertema “Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial Menyongsong Masa Depan Sejahtera” ini diikuti oleh sekitar 1.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI Jakarta, 21 April 2025, dihadiri Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK (KE PEPK OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Acara digelar untuk meningkatkan literasi keuangan bagi kaum perempuan khususnya bagi para perempuan pekerja migran dari Indonesia agar pandai dalam mengelola keuangan dan terhindar dari berbagai tawaran kejahatan atau penipuan keuangan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Abdul Kadir Karding berpesan kepada para PMI untuk memanfaatkan kegiatan edukasi keuangan ini untuk memahami berbagai tips pengelolaan keuangan dan memilih transaksi serta investasi keuangan yang tepat sehingga hasil kerja di luar negeri bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. KP2MI selain fokus pada peningkatan kualitas pelindungan serta peningkatan kualitas tenaga kerja migran Indonesia, juga fokus pada peningkatan literasi keuangan pekerja migran.

Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan peran penting PMI sebagai salah satu pilar penting dalam

menggerakkan perekonomian, baik melalui kontribusi langsung di luar negeri maupun melalui remitansi yang dikirim ke Indonesia. Remitansi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah asal, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap ketahanan eksternal dan stabilitas neraca pembayaran negara.

Dalam semangat Kartini, Destry turut memotivasi kaum perempuan untuk lebih berdaya secara finansial, mampu mengakses layanan keuangan yang inklusif dan aman, serta menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

KE PEPK OJK Friderica mengatakan para perempuan PMI tidak hanya berperan penting bagi keluarganya, namun juga telah berkontribusi besar pada pendapatan negara sehingga harus dibekali dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi. Friderica juga berpesan agar para pekerja migran Indonesia lebih berhati-hati terhadap penipuan yang belakangan banyak muncul di masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para tokoh perempuan dari Komisi XI DPR RI, yaitu Puteri Anetta K., Annisa M.A. Mahesa, Julie Sutrisno Laiskodat, Anna Mu’awanah, Anis Byarwati, dan Andi Yuliani Paris.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan beberapa materi edukasi sebagai bekal tambahan bagi peserta PMI terkait dengan pengenalan produk tabungan emas dari Pegadaian, layanan remitansi dan QRIS dari perbankan, perencanaan keuangan, serta *sharing session* dari figur PMI inspiratif untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat dan kualitas hidup.

OJK *Digiclass* Content Creator Penyandang Disabilitas

OJK *Digiclass* Content Creator Penyandang Disabilitas Perempuan,

dilaksanakan pada 22 April 2025, sehari setelah dilaksanakan Edukasi Keuangan bagi perempuan Pekerja Migran Indonesia. OJK *Digiclass* merupakan rangkaian edukasi keuangan OJK dalam rangka perayaan Hari Kartini.

Kegiatan ini mengambil tema “Selalu berkarya, Berdaya Tak Mengenal Batas”. Tema ini selaras dengan dukungan OJK kepada wanita penyandang disabilitas untuk terus berkarya tanpa batas dengan memanfaatkan kanal digital.

Dalam sambutannya, Friderica menyampaikan bahwa penyandang disabilitas merupakan satu dari sepuluh segmen prioritas yang diperluas oleh

“

Digiclass bukan sesuatu yang hanya hari ini dilakukan, tetapi kami menunjukkan program yang terus menerus dan berkelanjutan. Saya ingin semua lebih berdaya, lebih eksis di masyarakat dengan memberikan konten-konten sosial media yang kreatif dan juga bermanfaat buat masyarakat kita.

”



OJK dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat. "Jadi, *Digiclass* bukan sesuatu yang hanya hari ini dilakukan, tetapi kami menunjukkan program yang terus menerus dan berkelanjutan. Saya ingin semua lebih berdaya, lebih eksis di masyarakat dengan memberikan konten-konten sosial media yang kreatif dan juga bermanfaat buat masyarakat kita," kata Friderica.

Friderica berharap melalui program ini akan lahir *content creator* yang turut berperan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui konten edukatif dan inspiratif. Dalam kegiatan OJK *Digiclass* kali ini, OJK berkolaborasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN), dan Yayasan Rumah Mans serta dihadiri lebih dari 100 peserta wanita penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan edukasi dan pelatihan dari para narasumber yang juga merupakan *content creator* penyandang disabilitas mengenai produk dan layanan di sektor keuangan, waspada penipuan keuangan, serta bagaimana menjadi *content creator* yang dapat memanfaatkan media sosial secara tepat dan bijak.

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Samrotunnajah Ismail menekankan pentingnya akses informasi, kebebasan berekspresi dan berkomunikasi bagi penyandang disabilitas. Samrotunnajah juga menyambut baik kegiatan ini yang merupakan wujud komitmen OJK sebagai Badan Publik Informatif.

OJK memberikan perhatian terhadap terwujudnya akses keuangan setara bagi penyandang disabilitas. Data

Susenas tahun 2023 menunjukkan hanya 24,3% penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal dan hanya 14% dari rumah tangga dengan penyandang disabilitas yang memiliki akses ke kredit. Angka ini lebih rendah dibandingkan 20% pada rumah tangga non-disabilitas.

Beberapa waktu lalu, OJK telah meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya atau Setara. Pedoman Setara dapat menjadi pedoman bagi

Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dalam menerapkan amanat POJK 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan untuk memastikan akses yang setara bagi calon konsumen/konsumen penyandang disabilitas.

Salah satu target Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) OJK adalah mengakselerasi penggunaan produk keuangan oleh 30% kelompok penyandang disabilitas di tahun 2025.

OJK Dorong Perempuan Cerdas, Berdaya, dan Berintegritas Melalui Semangat Keteladanan Kartini

OJK menyelenggarakan perayaan Hari Kartini dengan mengangkat tema "Perempuan Cerdas, Berdaya, dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas" sebagai bentuk komitmen dalam mendorong kesetaraan gender, penguatan integritas, dan pemberdayaan perempuan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta secara langsung dan sekitar 3.000 peserta daring yang berasal dari internal OJK, pemangku kepentingan, serta anggota Komisi XI DPR RI ini bertujuan untuk menginspirasi perempuan agar menjunjung tinggi nilai integritas, meningkatkan kesadaran akan peran strategis perempuan dalam pembangunan sektor jasa keuangan yang transparan dan berintegritas, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, dalam sambutannya menyampaikan urgensi penguatan integritas di kalangan perempuan Indonesia, khususnya di sektor jasa

keuangan. “Kita melihat bahwa kesetaraan gender memiliki korelasi erat dengan tingkat integritas suatu bangsa. Negara-negara dengan indeks ketimpangan gender rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang juga rendah. Ini menjadi cermin bahwa partisipasi perempuan dalam tata kelola harus ditingkatkan,” kata Sophia.

Sophia juga menyoroti sejumlah tantangan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan saat ini, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, dampak budaya konsumtif akibat fenomena FOMO (*Fear of Missing Out*), hingga tingginya tingkat korban pinjaman *online* ilegal, terutama di kalangan ibu rumah tangga dan guru.

Acara ini juga menghadirkan berbagai narasumber inspiratif, antara lain Duta Besar RI untuk Portugal Susi Marleny Bachsin dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. “Perempuan bukan hanya sekadar bagian dari perekonomian, tetapi penggerak utama dalam menciptakan perubahan. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan di sektor jasa keuangan, kita tidak hanya membangun

ketahanan ekonomi nasional, tapi juga mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Susi Marleny Bachsin, Duta Besar RI untuk Portugal.

Susi juga menekankan pentingnya literasi keuangan dan dukungan bagi wirausaha perempuan, serta mendorong kepemimpinan perempuan di sektor formal sebagai bagian dari transformasi ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk menyadari peran penting perempuan bukan hanya sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pendidik generasi masa depan. Veronica juga menekankan pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak, terutama di era digital saat ini.

“Kita harus sadar bahwa perempuan sejak awal adalah agen perubahan. Tapi terlalu lama mereka tidak tahu bahwa mereka punya hak, punya mimpi, dan mampu luar biasa. Saat ini, tugas kita adalah menciptakan ruang dan ekosistem yang mendorong perempuan untuk sadar, diakui, dan diberdayakan,” jelas Veronica.

“Dulu, guru anak hanya orang tua dan guru di sekolah. Sekarang, kita bersaing dengan Google. Maka nilai-nilai seperti etika, empati, dan moral hanya bisa ditanamkan dari rumah. Kuncinya adalah menjaga kedekatan dengan anak dan menjadi ‘teman pertama’ mereka dalam menghadapi tantangan,” tambah Veronica.

Dalam kegiatan ini, OJK juga menggarisbawahi pentingnya peran perempuan dalam menjaga budaya *anti-fraud* dan integritas sejalan dengan berbagai inisiatif yang dijalankan OJK, termasuk peran aktifnya dalam menjaga integritas, melalui pemahaman dan implementasi terhadap larangan gratifikasi yang dapat dianggap suap dan kewajiban pelaporan.

Selain itu juga, keterlibatan dalam pelaporan indikasi *fraud* maupun pelanggaran etik melalui *email*, situs *web*, atau surat tertulis sesuai kanal yang tersedia OJK, yaitu saluran pelaporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* (WBS).

OJK sendiri telah menunjukkan komitmennya melalui Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi yang ketat, serta sinergi dengan KPK dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat. Sebagai penutup, OJK mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus bergerak, bermimpi, dan berkarya tanpa kehilangan pijakan nilai. Seperti dikatakan Kartini, “Habis gelap terbitlah terang”, perubahan menuju masa depan Indonesia Emas dimulai dari langkah kecil yang berani dan penuh integritas.

“

OJK mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus bergerak, bermimpi, dan berkarya tanpa kehilangan pijakan nilai. Seperti dikatakan Kartini, “Habis gelap terbitlah terang”, perubahan menuju masa depan Indonesia Emas dimulai dari langkah kecil yang berani dan penuh integritas.

”

OJK Melaksanakan Rangkaian Program GENCARKAN 2025



Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui program GENCARKAN 2025 meluncurkan Bulan Literasi Keuangan (BLK) yang akan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025.

Sebagai penanda dimulainya BLK 2025, sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional, OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan inspiratif bertema “Generasi Muda Cerdas Keuangan: Membangun Ketangguhan di Era Keuangan Digital”, di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya, Malang, 7 Mei 2025. Kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Malang dan sekitarnya. BLK 2025 bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK OJK), Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan edukasi keuangan sangat penting. Tujuannya adalah agar masyarakat, termasuk generasi muda, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan terlindungi sebagai konsumen.

Selain itu, Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan termasuk perencanaan keuangan, dan berharap agar generasi muda mampu mengelola penghasilan yang didapat ketika bekerja nantinya dengan baik, sehingga dapat memenuhi tujuan keuangan di masa mendatang.

Menurutnya, kecakapan digital yang dimiliki masyarakat harus diimbangi dengan kecerdasan

finansial. Kecerdasan finansial atau literasi keuangan sangat penting karena merupakan *essential life skill* yang harus dimiliki oleh setiap individu termasuk generasi muda, sehingga dapat mengelola keuangan dengan bijak, memahami risiko digital, serta turut menyebarkan literasi keuangan di masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK, dan menyambut baik kegiatan edukasi keuangan sebagai upaya peningkatan literasi keuangan generasi muda di wilayah Kota Malang.

Kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan OJK menjadi bentuk komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan generasi muda di tengah tantangan era digital yang saat ini tengah marak dengan

kasus kejahatan keuangan digital, serta pencurian data pribadi. Generasi muda diharapkan memiliki ketangguhan digital, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan.

Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025

Kegiatan edukasi keuangan pada momentum Hari Pendidikan nasional di Malang tak lepas dari Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025. BLK 2025 sendiri telah diluncurkan OJK secara nasional untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara masif dan merata. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia secara luas, masif, dan merata. Di tahun ini, BLK berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025, dengan melibatkan berbagai pihak—PUJK, asosiasi, kementerian/ lembaga, hingga masyarakat umum.



BLK 2025 hadir dengan berbagai kegiatan inspiratif, seperti:

- *Financial Literacy Series* – Webinar, *podcast*, *talk show*, hingga *workshop* finansial.
- *Financial Literacy Campaign* – Edukasi keuangan lewat media sosial.
- *Financial Literacy Award* – Apresiasi untuk program literasi keuangan terbaik.
- *Kick-off* dan Puncak Acara – Diselenggarakan serentak di seluruh kantor OJK daerah.

Selain di Malang, Kick-Off BLK 2025 juga dilakukan di Brebes dan di Karanganyar. Peluncuran BLK 2025 dilakukan bersamaan dengan

Kegiatan Edukasi Keuangan dengan tema “Generasi Muda Melek Finansial, Wujudkan Masa Depan Sejahtera di Era Digital” yang digelar di Auditorium Universitas Muhadi Setiabudi (UMUS), Kabupaten Brebes, 22 Mei 2025.

Kegiatan dihadiri oleh KE PEPK OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Roby Setiadi, Wakil Bupati Brebes Wurja beserta pimpinan Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan diikuti oleh lebih dari 500 mahasiswa UMUS secara tatap muka serta 2.314 mahasiswa Universitas Panca Sakti dan mahasiswa lainnya secara *online*. Generasi muda merupakan salah satu dari sepuluh sasaran prioritas penerima program

Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

OJK juga menggelar kegiatan edukasi keuangan di wilayah Solo Raya bertema “Masa Depan Sejahtera dengan Perencanaan Keuangan” yang digelar dalam rangka BLK 2025 dan bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, 23 Mei 2025.

Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari ASN Muda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA), dan Komunitas Pemuda Karanganyar di wilayah Solo Raya ini menjadi wujud nyata komitmen OJK dan Industri Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan kaum muda secara masif dan merata.



KE PEPK OJK Friderica Widyasari Dewi, Bupati Karanganyar Rober Christanto, Kepala OJK Solo Eko Haryanto, beserta para pimpinan dari PT Bank Jateng hadir sekaligus menandai dimulainya BLK 2025 di wilayah Solo Raya.

Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa OJK sebagai otoritas di sektor jasa keuangan selain berperan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan juga memiliki tugas yang penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Bapak/Ibu/Adik-adik semua yang ada di sini merupakan konsumen di sektor keuangan, juga masyarakat Indonesia yang harus kita lindungi. Nah kita percaya perlindungan yang paling utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat semua,” kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan bahwa masyarakat yang terliterasi dengan baik, maka dapat terlindungi dan terhindar dari berbagai kejahatan atau penipuan yang dapat merugikan, khususnya di era digital seperti saat ini.

Kegiatan BLK 2025 dilaksanakan oleh OJK dan seluruh Kantor OJK di daerah dengan dukungan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai *campaign manager* di wilayah kerja masing-masing sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan secara masif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

OJK PEDULI

OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia atau disebut OJK PEDULI menjadi salah satu strategi OJK dalam mengoptimalkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi keuangan di masyarakat. OJK PEDULI bertujuan untuk membentuk

Duta Literasi Keuangan serta menyelenggarakan pelatihan *Training of Trainers (ToT)* bagi para duta tersebut. OJK PEDULI berperan dalam mengedukasi dan mendiseminasi informasi tentang literasi keuangan kepada masyarakat luas dalam rangka peningkatan literasi keuangan.

Melalui pelatihan ToT, para Duta Literasi Keuangan diharapkan dapat berperan sebagai perpanjangan tangan OJK dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan secara masif dan merata, dengan mengedepankan efek pengganda (*multiplier effect*) yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a) OJK PEDULI Segmen Prioritas, yakni Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia yang berasal dari Masyarakat umum.
 - b) OJK PEDULI Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), yakni Inisiasi Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia yang berasal dari pegawai PUJK.
 - c) OJK PEDULI Mahasiswa, yakni Inisiasi Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia yang berasal dari kalangan mahasiswa.
- Calon OJK Penggerak Duta Literasi

Keuangan Indonesia (OJK PEDULI) mempersiapkan dokumen awal bagi kategori OJK PEDULI Segmen Prioritas, PUJK maupun Mahasiswa, yaitu:

- a) Nomor Telepon dan/atau email aktif yang akan digunakan untuk korespondensi.
- b) Dokumen Tanda Bukti telah menjadi OJK PEDULI atau telah menerima edukasi keuangan berupa (dapat dipilih salah satu): *Certificate* Kegiatan Edukasi Keuangan yang diselenggarakan dan diterbitkan oleh OJK atau Lembaga Jasa Keuangan (contoh: Bank, Pergadaian dll) atau *E-Certificate Learning Management*

System Edukasi Keuangan (LMSKU) OJK yang diperoleh setelah menyelesaikan minimal satu modul pembelajaran dan dinyatakan lulus pada modul tersebut. Adapun panduan tutorial LMSKU OJK dapat diakses pada link: gapura.ojk.go.id/tutorial_lmskuojk.

Menjadi OJK PEDULI tentu ada manfaat yang didapat, yakni:

- Diseminasi edukasi keuangan yang dilaksanakan oleh Duta akan mendapatkan poin dan dapat ditukarkan dengan *merchandise* menarik dari OJK.
- Dapat turut diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan edukasi OJK (atas pertimbangan dari OJK).
- Dapat mengajukan Program Magang ke OJK dan kemudahan permintaan akses data dalam hal penyusunan skripsi/ laporan.

Cara Mendaftar OJK PEDULI

1. Calon Duta membuat ID OJK PEDULI dengan mengakses *link* gapura.ojk.go.id/ojkpeduli_edukeu
2. Calon Duta *login* ke dualiterasikeuangan.id
3. Unggah persyaratan *e-certificate* Edukasi/ LMSKU ke gapura.ojk.go.id/pendaftaran_ojkpeduli dan lengkapi foto serta data profil.
4. Bagi Duta Syariah, pilih minat “Keuangan Syariah” di menu Profil.



Wajah Baru Layanan Digital OJK

OJK mentransformasi sistem layanan digitalnya dengan meluncurkan portal data dan metadata sektor jasa keuangan menjadi lebih terintegrasi.

OJK resmi meluncurkan Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan (SJK) Terintegrasi, sebagai pusat informasi jasa keuangan. Peluncuran Portal Data dilakukan Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, 17 Maret lalu. Acara ini dihadiri Anggota Dewan Komisiner OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Portal Data ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam melakukan transformasi dan digitalisasi layanan OJK kepada masyarakat pengguna data sektor jasa keuangan. Tingginya kebutuhan informasi yang akurat mengenai SJK dari para akademisi, peneliti, analis, pelaku usaha jasa keuangan, serta media, mendorong OJK melakukan perubahan besar pada

sistem datanya. Data yang sebelumnya hanya tersedia secara statis, seperti PDF atau Excel, kini dapat diakses dalam bentuk tabel dinamis yang lebih interaktif dan dapat diunduh dalam waktu yang lebih cepat.

Portal tersebut dirancang dalam bentuk platform digital berbasis web untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi data di SJK. Sehingga diharapkan dapat menciptakan disiplin pasar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

"Portal ini diharapkan dapat membuat proses diseminasi data menjadi lebih efisien dan efektif, serta memastikan keselarasan antara data pelaporan dengan data yang dipublikasikan," ujar Mahendra.

Pengguna dapat mengakses data terkait perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, modal ventura, pegadaian, perusahaan-perusahaan

penunjang, investor, dan berbagai produk pasar modal. Tak hanya itu, aplikasi ini juga akan berisi data lain yang sesuai dengan publikasi data dan statistik yang telah ada sebelumnya.

Ke depannya OJK akan menambahkan data lain yang berkaitan dengan industri teknologi sektor keuangan, aset digital, termasuk di dalamnya adalah aset kripto. Di dalamnya juga akan ada data yang terkait dengan perlindungan konsumen dan langkah-langkah untuk meningkatkan perilaku pelaku jasa keuangan. Sehingga proses bisnis dalam penyebaran data bisa menjadi lebih efisien dan selaras antara data pelaporan dengan data publikasi.

Sementara itu, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus Edy Siregar, mengatakan aplikasi tersebut sudah dikembangkan secara bertahap di OJK sejak tahun 2022. Pengembangan portal data

ini merupakan implementasi dari Arsitektur Pengelolaan Data SJK Terintegrasi 2023-2027.

“Sebelum adanya Portal Data, publikasi data statistik OJK dilakukan melalui website OJK. Pengelolaan data statistik tersebut masih dilakukan secara manual dan dari sisi pengguna belum terdapat fitur interaktif dan dinamis yang memungkinkan pengguna mencari data sesuai kebutuhannya saja,” kata Agus.

OJK juga terbuka dengan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan kesesuaian data yang disajikan dalam portal ini, termasuk kualitas metadata SJK. “Dengan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, kami yakin Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi ini akan terus dioptimalkan dan dapat



memberikan manfaat bagi kita semua,” tutur Mahendra.

Bagi pengguna yang membutuhkan data terkait SJK dapat mengunjungi pusat data OJK di <https://data.ojk.go.id>



Manfaat dan Fitur Portal Data dan Metadata Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi



Timeliness

Dalam hal ketersediaan data, pengguna data akan mendapatkan data publikasi dengan lebih cepat.



Structured Data Presentation

Pengguna dapat menjelajah data terstruktur sesuai kebutuhan dengan lebih efektif dan efisien dengan menerapkan fitur pivot table sehingga pengguna dapat memilih metrik/dimensi data yang dibutuhkan



Data Catalog

Terdapat katalog data yang berisi metadata atas data yang tersedia pada Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, sehingga pengguna dapat memahami data yang di gunakan.



Data Visualization

Pengguna dapat memilih visualisasi data yang diinginkan baik dalam bentuk tabel maupun grafik berupa chart, sehingga pengguna dapat leluasa memilih visualisasi yang di butuhkan.



Eksport Data

Data termasuk chart maupun katalog data yang di tampilkan pada Portal Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi dapat diunduh oleh pengguna untuk dimanfaatkan lebih lanjut ke dalam format (.xlsx.csv,.pdf, .jpg, atau .png)

Peluncuran Portal Data ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam mengembangkan layanan berbasis digital yang lebih inklusif dan inovatif.



Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Sektor Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perbankan bertanggung jawab dalam menggunakan kecerdasan artifisial atau Akal Imitasi (AI) untuk mempercepat transformasi digital. Penggunaannya di berbagai kegiatan jasa perbankan diperkirakan akan terus meningkat.

OJK telah meresmikan tata kelola kecerdasan artifisial perbankan Indonesia sebagai bentuk dukungan dalam penguatan akselerasi transformasi digital di sektor perbankan, khususnya implementasi kecerdasan artifisial atau Akal Imitasi (AI) dalam proses bisnis dan operasional bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rae mengatakan, AI merupakan komponen penting di masa mendatang dan menjadi kekuatan

transformasional dalam teknologi modern.

Menurutnya, penggunaan AI memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital sektor perbankan. Teknologi modern ini memiliki kemampuan meniru kecerdasan manusia melalui mesin dan perangkat lunak. Hal ini dapat mempercepat layanan sehingga banyak diadopsi secara global termasuk pada sektor jasa keuangan.

Salah satu penerapan utama AI di perbankan adalah untuk meningkatkan *Customer Experience (CX)* atau pengalaman nasabah. Melalui *chatbot* dan asisten *virtual* yang didukung AI, bank dapat memberikan dukungan instan dan personal kepada nasabahnya sepanjang waktu, melalui berbagai saluran distribusi layanan.

Selain itu, AI memungkinkan bank untuk menawarkan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, saran keuangan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan setiap individu, serta pengalaman pengelolaan rekening yang lancar, sehingga mendorong keterlibatan dan loyalitas pelanggan yang lebih dalam. Tujuan utama dari implementasi AI adalah untuk meningkatkan pengalaman nasabah dalam melakukan perbankan.

Dalam bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan, algoritma AI dapat mendeteksi aktivitas penipuan, menilai risiko kredit, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan secara *real-time*, sehingga menjaga aset dan reputasi bank sekaligus menjunjung standar peraturan.

Integrasi AI dalam perbankan menawarkan banyak manfaat bagi bank, nasabah, dan ekosistem keuangan yang lebih luas. **Pertama**, AI meningkatkan kepuasan dan loyalitas

pelanggan dengan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi selaras dengan preferensi dan kebutuhan individu. **Kedua**, AI mendorong efisiensi operasional dan efektivitas biaya, memungkinkan bank menyederhanakan proses, mengurangi biaya, dan mengalokasikan kembali sumber daya secara bijaksana. **Ketiga**, AI memperkuat manajemen risiko dan praktik kepatuhan, menjaga aset dan reputasi bank sekaligus menjunjung standar peraturan.

Dalam dokumen Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, konsep pengembangan dan penerapan sistem AI dilakukan secara menyeluruh di sepanjang siklus hidup AI (*AI life cycle*) dan siklus bisnis perbankan guna memastikan bahwa sistem AI dikembangkan dan dioperasikan secara etis, aman, dan sesuai regulasi.

Dengan demikian, sistem AI yang digunakan bank diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik, melindungi kepentingan nasabah, serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem perbankan dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia ini semakin melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian

Tingkat Maturitas Digital Bank Umum dan Panduan Resiliensi Digital (*Digital Resilience*).

Proses penyusunan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia ini mengacu pada *international best practice* di antaranya AI Act di Uni Eropa, *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *guidance* dan *benchmarking* pada beberapa negara antara lain Amerika Serikat, China, Singapura, dan Jepang.

Dalam penyusunannya, panduan ini juga mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dian mengingatkan, daya saing (*competitiveness*) dan eksistensi bank pada saat ini dan mendatang akan sangat tergantung pada kemampuan bank di dalam menerapkan dan mengelola teknologi, yang memerlukan biaya sangat besar. "Oleh karena itu, kami mengharapkan agar bank memahami hal ini dan melakukan langkah-langkah strategis, termasuk untuk terus mempertimbangkan konsolidasi bank atau langkah-langkah lain untuk mendorong daya saing," tutur Dian.



Mengenal Pasar Derivatif Keuangan Indonesia



Sejak diberlakukannya Peraturan OJK (POJK) No.1 tahun 2025 pada 10 Januari 2025, OJK secara resmi menyatakan kewenangannya mengatur dan mengawasi pasar derivatif keuangan. Produk derivatif keuangan yang diawasi antara lain kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak opsi atas efek, dan kontrak lainnya.

POJK ini mengatur mengenai ruang lingkup pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek, produk derivatif keuangan, pelaku derivatif keuangan, penyelenggaraan infrastruktur pasar derivatif keuangan, pengumuman, pengawasan pelaku dan penyelenggara infrastruktur

Babak baru pasar derivatif keuangan di Indonesia dimulai. OJK telah resmi memberlakukan Peraturan OJK (POJK) tentang tata kelola perdagangan di pasar derivatif pada awal 2025. Transformasi otoritas penata kelola ekosistem keuangan tersebut akan membawa angin segar bagi investor.

derivatif keuangan, penegakan hukum, pelaporan serta peralihan produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur derivatif keuangan.

Namun, apa sebenarnya pasar derivatif keuangan? Pasar derivatif

keuangan adalah pasar tempat derivatif keuangan diperdagangkan. Derivatif keuangan adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset lain, seperti saham, obligasi, komoditas, atau suku bunga. Pasar

ini menyediakan tempat bagi investor untuk melindungi diri dari risiko (*hedging*), melakukan spekulasi, atau mendapatkan akses ke pasar lain. Produk yang biasa diperdagangkan di pasar derivatif umumnya dalam bentuk kontrak berjangka (*futures*), kontrak opsi, dan *swap* (perjanjian tukar arus kas).

Derivatif memainkan peran strategis dalam sistem keuangan modern karena beberapa alasan penting. Pertama, instrumen ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko melalui mekanisme lindung nilai (*hedging*). Selanjutnya, derivatif berkontribusi pada pendalaman pasar keuangan dengan meningkatkan likuiditas dan efisiensi. Pasar *spot* yang dilengkapi instrumen derivatif umumnya memiliki biaya transaksi lebih rendah dibandingkan pasar tanpa derivatif. Hal ini terjadi karena perbedaan antara harga beli dan jual menjadi semakin sempit. Selain itu, derivatif juga berperan penting dalam proses pencarian harga acuan (*price discovery*). Melalui mekanisme ini, pelaku pasar dapat memperoleh informasi tentang nilai wajar suatu aset.

Namun, pemahaman yang baik tentang derivatif dan risikonya sangat penting sebelum berinvestasi di pasar ini. Investor wajib mengetahui apa saja risiko yang akan terjadi pada perdagangan derivatif keuangan. Seperti risiko pasar, yakni fluktuasi aset acuan yang dapat mengakibatkan dampak finansial substansial, karena karakteristik *leverage* derivatif. Volatilitas harga derivatif umumnya lebih tinggi dibanding aset dasarnya. Selain itu juga ada risiko operasional di mana kompleksitas produk derivatif memerlukan pemahaman mendalam dan sistem pengendalian internal yang kuat. Kesalahan dalam penilaian atau eksekusi transaksi dapat mengakibatkan kerugian.



Peran OJK dalam pasar derivatif keuangan selain mengatur dan mengawasi, OJK juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dan masyarakat dalam kegiatan di pasar derivatif keuangan. Termasuk melakukan pengendalian risiko untuk melindungi investor dan sistem keuangan.

Perlindungan yang dimaksud tentu saja legalitas terhadap komoditi derivatif. Selain POJK, dasar hukum yang mendasarinya menjadi satu kesatuan dengan dasar hukum yang mengatur Perdagangan Berjangka Komoditi, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas, Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Walau saat ini transaksi pasar derivatif di Indonesia masih belum populer, peluang pertumbuhan tetap terbuka lebar berkat manfaatnya. Dengan dukungan dan upaya berkelanjutan dari OJK dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), diharapkan pasar derivatif di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, teratur, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kolaborasi Multisektor Dorong Pertumbuhan Asuransi Syariah

Pergeseran minat masyarakat yang semakin mengarah pada produk berbasis syariah pada berbagai kategori mulai dari makanan, *fashion*, kosmetik, hingga perbankan, turut memperkuat peluang pertumbuhan asuransi syariah. Namun, butuh kolaborasi multisektor demi mendorong asuransi syariah terus bertumbuh.



Industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah. Didukung oleh populasi Muslim terbesar di dunia dan regulasi yang semakin kondusif, sektor ini menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan yang semakin inklusif.

Permintaan akan asuransi kesehatan terus meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19 yang mendorong kesadaran masyarakat untuk memiliki perlindungan kesehatan. Di sisi lain, penetrasi asuransi di Indonesia masih sangat rendah, sehingga ruang pertumbuhan masih terbuka lebar, khususnya untuk produk asuransi kesehatan syariah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah aset industri asuransi jiwa syariah dari tahun sebelumnya sebesar 4% dan terus bertumbuhnya jumlah perusahaan asuransi syariah lengkap dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan aset ini didorong oleh pertumbuhan permintaan akan produk syariah dan inovasi produk yang semakin beragam. Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, antara lain kondisi ekonomi pasca-pandemi, daya beli masyarakat yang menurun, serta lonjakan inflasi medis yang diproyeksikan mencapai 19% pada 2025, jauh di atas inflasi umum yang hanya 2,6%. Kenaikan biaya pengobatan ini berkontribusi terhadap peningkatan klaim asuransi kesehatan yang melebihi pertumbuhan premi di industri.

Untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah, diperlukan sinergi antara regulator, industri

keuangan, dan pelaku ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan literasi dan penetrasi asuransi syariah di Indonesia.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK mengatakan, pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola, dimulai dari akses terhadap asuransi bagi masyarakat, fasilitas kesehatan hingga BPJS Kesehatan, agar ekosistem kesehatan di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien," kata Ogi.

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) turut merekomendasikan lima langkah strategis untuk memperkuat ekosistem asuransi syariah di Indonesia. Langkah ini diperlukan agar sektor asuransi syariah dapat lebih kompetitif dan sejalan dengan standar internasional, khususnya dalam menghadapi proses akses Indonesia ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

PEBS FEB UI memberikan lima rekomendasi utama untuk memperkuat asuransi syariah di Indonesia.

1. Pertama, diversifikasi dan inovasi produk. Produk asuransi syariah di Indonesia masih terbatas dan kurang beragam dibandingkan dengan produk asuransi konvensional. Oleh karena itu, PEBS FEB UI merekomendasikan pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Rekomendasi kedua adalah penguatan modal dan struktur keuangan. Saat ini, industri asuransi syariah

masih menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan modal minimum sesuai ketentuan OJK.

3. Rekomendasi selanjutnya yakni penyesuaian regulasi untuk meningkatkan daya saing. Diketahui, regulasi yang berlaku saat ini dinilai masih membatasi pertumbuhan industri asuransi syariah. Batasan investasi luar negeri yang hanya 20% dari total investasi membatasi fleksibilitas perusahaan asuransi syariah dalam mengoptimalkan portofolio investasinya.
4. Rekomendasi keempat adalah peningkatan SDM dan kompetensi profesional. Adapun, industri asuransi syariah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang ini. Kerja sama antara universitas, regulator, dan industri perlu diperkuat untuk memastikan tersedianya tenaga profesional yang kompeten di bidang asuransi syariah.
5. Terakhir adalah meningkatkan literasi dan inklusi asuransi syariah. Saat ini, daya beli masyarakat terhadap produk asuransi syariah masih rendah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di sektor perasuransian.

Kelima rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam memperkuat industri asuransi syariah agar lebih kompetitif secara global. Jika regulasi dan ekosistem industri asuransi syariah diperkuat, ini tidak hanya mendukung akses OECD tetapi juga meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional.

Optimalkan Peran Ibu sebagai Duta Literasi melalui Program SICANTIKS

OJK wujudkan komitmennya untuk terus memperkuat literasi keuangan syariah di Indonesia melalui peluncuran program Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Program ini menyasar perempuan dan pelaku UMKM sebagai motor utama dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah.



OJK terus mengembangkan program-program literasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Sehingga setiap individu dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan keuangan. Salah satu program yang diperkenalkan OJK dengan menyasar target ibu-ibu adalah Sahabat Ibu Cakap Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau disingkat SICANTIKS.

Program SICANTIKS dirancang sebagai ruang edukasi yang praktis dan menyenangkan bagi para ibu. Program ini diharapkan bisa menjadi gerakan perubahan dari bawah. Baik secara daring maupun luring, para ibu diajak untuk belajar mengelola keuangan, mengenal produk jasa keuangan formal, serta melihat potensi ekonomi keluarga dari sudut pandang yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi, program ini sengaja ditujukan untuk perempuan karena menjadi salah satu dari 10 segmen prioritas edukasi keuangan untuk pengelolaan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal lain, karena perempuan sejatinya adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya yang akan mengajarkan banyak hal. Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman dan penggunaan produk syariah di Indonesia, juga menjadi alasan OJK mengencarkan program ini.

Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, M Ismail Riyadi, mengatakan melalui program SICANTIKS, perempuan didorong untuk menjadi agen literasi keuangan syariah di komunitas maupun media sosial. Program ini menjadi bagian dari



Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), yang menargetkan dua juta Duta Literasi Keuangan. “Kami sudah menyiapkan modul-modul dasar untuk para Duta agar bisa mengajarkan literasi keuangan kepada komunitasnya, termasuk informasi soal kejahatan finansial digital,” kata Ismail.

Para Duta Literasi tersebut akan fokus untuk memberikan informasi-informasi dan pengetahuan tentang keuangan secara benar dan juga keuangan syariah mengingat saat ini era digitalisasi memberi konsekuensi pada rawannya kejahatan finansial bagi perempuan. Salah satunya adalah terkait kasus pinjaman *online* dan juga investasi ilegal yang banyak merugikan kaum perempuan.

Untuk itu, OJK menggelar kegiatan *Training of Trainers* (ToT) bagi para Duta Literasi Keuangan Syariah di setiap kesempatan. Di Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah terlaksana kegiatan ToT pada 17 Mei lalu yang diikuti oleh 100 anggota Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, 400 pendamping UMKM, dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta lebih dari 4.900 peserta lainnya secara daring dari berbagai wilayah di Sumatera. Program

SICANTIKS yang merupakan hasil kolaborasi antara OJK dan PT PNM direncanakan akan terus dilaksanakan sepanjang 2025 di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.

Kegiatan SICANTIKS yang pertama kali diluncurkan pada 2023 telah menjangkau peserta dari wilayah Jabodebek serta Bandung dan telah melahirkan sebanyak 2.350 Duta Literasi Keuangan Syariah yang berasal dari berbagai organisasi muslimah dan majelis taklim.

Tahun ini, OJK menginovasi program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) yang bertujuan untuk memantau implementasi *Training of Community* (ToC) yang dilakukan oleh Duta Literasi Keuangan, termasuk Keuangan Syariah. Oleh karenanya, peserta ToT SICANTIKS juga akan terdaftar menjadi bagian dari Duta Literasi Keuangan pada OJK PEDULI. Melalui sinergi kedua program ini, diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan edukasi keuangan syariah yang semakin optimal hingga dapat menjangkau seluruh masyarakat.



Komputasi Awan dalam Sektor Jasa Keuangan

Di era digital yang terus berkembang, teknologi komputasi awan (*cloud computing*) dan Akal Imitasi (AI) menjadi penggerak utama transformasi di berbagai sektor, termasuk jasa keuangan

Pada masa lalu, layanan perbankan sangat bergantung pada interaksi langsung di kantor cabang. Namun kini, nasabah bisa membuka rekening, mengajukan pinjaman, bahkan melakukan investasi hanya melalui aplikasi di ponsel pintar. Perubahan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya infrastruktur komputasi

modern seperti *cloud computing* (komputasi awan).

Komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan pengguna agar dapat mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet, bukan dari komputer lokal atau server fisik.

Teknologi ini disebut-sebut menawarkan kemudahan dalam hal aksesibilitas, fleksibilitas, dan efisiensi. Dengan komputasi awan, setiap organisasi, perusahaan, bahkan perorangan dapat bekerja lebih praktis tanpa harus memikirkan pengelolaan infrastruktur teknologi yang kompleks.

Dalam industri keuangan, komputasi awan memungkinkan bank menyimpan dan memproses data dalam skala besar dengan fleksibilitas tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Teknologi ini mendukung otomatisasi proses kolaborasi lintas departemen, serta mempercepat inovasi produk keuangan digital.

Contohnya, pengembangan fitur *mobile banking* kini bisa dilakukan secara lebih cepat dan aman melalui platform *cloud*. Selain itu, *cloud* juga memungkinkan *backup* data secara *real-time*, sehingga risiko kehilangan data menjadi jauh lebih kecil.

Sebagai pelopor dalam adopsi teknologi *cloud* dan AI, *fintech* telah mendorong kemajuan signifikan melalui inovasi produk, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Dengan regulasi yang mendukung, teknologi ini memungkinkan kolaborasi yang lebih luas antara layanan *fintech*, infrastruktur pendukung, serta ekosistem digital.

Manfaat Cloud dan AI dalam Industri Keuangan

Keamanan Data: *Cloud* meningkatkan perlindungan data, memberi keyakinan pada perusahaan *fintech* terkait keamanan data pelanggan.

Efisiensi Skalabilitas: Teknologi ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, mendukung berbagai kebutuhan operasional.

Analisis Data Cepat: Kombinasi *cloud* dan AI mempercepat proses analisis data, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Penerapan Cloud dan AI untuk Solusi Keuangan

Otomatisasi Proses: AI memungkinkan otomatisasi berbagai proses seperti analisis data, skor

kredit, deteksi wajah, dan pencegahan penipuan.

Analisis Prediktif: AI membantu perusahaan memprediksi tren dan membuat keputusan berdasarkan data.

Pelaporan Keuangan: AI mempermudah pelaporan yang lebih cepat dan akurat.

Regulatory Technology (RegTech): Menggunakan AI untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan.

Pencegahan Penipuan: Meningkatkan kemampuan deteksi penipuan melalui analisis data yang lebih mendalam.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat mengatakan penggunaan komputasi awan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perbankan. "Penggunaan *cloud computing* dapat menghemat biaya yang dikeluarkan industri perbankan melalui pengurangan modal awal investasi infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan mengurangi biaya *overhead* TI," kata Teguh.

Industri perbankan juga dapat berjalan lebih fleksibel dengan komputasi awan karena akses komputasi bersama, pembuatan inovasi baru dengan nilai investasi yang minimal, dan biaya *in house* data *architecture* yang rendah. Selain itu komputasi awan juga dapat memberi manfaat terkait skalabilitas, standarisasi, dan resiliensi pada industri perbankan dalam menjalankan transformasi digital.

Hanya saja penggunaan komputasi awan oleh industri perbankan juga menghadirkan berbagai risiko, seperti risiko operasional, kepatuhan, dan risiko hukum yang perlu diantisipasi. Risiko kepatuhan berkaitan dengan keterbatasan akses bagi regulator

untuk melakukan pemeriksaan dan risiko hukum berkaitan dengan ketidakpastian kewajiban hukum pada lokasi beroperasinya komputasi awan.

Selain risiko penggunaan komputasi awan, Teguh mengatakan saat ini perbankan masih menghadapi tantangan dalam melakukan transformasi digital terkait perlindungan data pribadi nasabah yang dasar hukumnya masih diproses, investasi TI yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

OJK berencana membuat aturan tentang pemanfaatan komputasi awan (*cloud*) pada sektor teknologi finansial (*fintech*). Ini bertujuan supaya data pengguna yang dikelola melalui *cloud* menjadi lebih aman. Kepala Eksekutif Group Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengatakan sudah membuat *master plan* untuk *fintech*, salah satunya terkait *cloud*. Ia tidak menutup kemungkinan bakal ada aturan khusus terkait pemanfaatan *cloud* oleh *fintech*.

Namun, Triyono tidak memerinci aturan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa kebijakan itu bertujuan agar pelaku usaha memahami manajemen risiko. "Sektor jasa keuangan ini berisiko kalau tidak diatur dengan hati-hati akan disrupsi," ujarnya. Triyono juga mengatakan, pengelolaan *cloud* yang aman dapat berkontribusi terhadap keamanan siber. Data pengguna *fintech* yang dikelola melalui *cloud* pun diklaim bisa lebih aman.

OJK pun tengah gencar mendorong sektor jasa keuangan bertransformasi ke digital. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi sebagai *game changer* seperti *open application programming interface* (API), *cloud*, *blockchain*, kecerdasan buatan alias *artificial intelligence* (AI), *super apps* hingga *omni-channel*.



Efek Domino Tarif Trump, Ancaman atau Peluang?

Pengaruh kebijakan tarif dagang Amerika Serikat yang ditetapkan Donald Trump telah berdampak besar terhadap perekonomian global. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah efek domino dari kebijakan tarif Trump tersebut menjadi ancaman bagi ekonomi Indonesia, atau justru peluang yang menguntungkan?

Terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru, Donald Trump, membawa perubahan pada perekonomian global. Salah satunya kebijakan Trump terhadap tarif perdagangan. Presiden AS ke-47 itu menerapkan tarif perdagangan yang cukup tinggi

yang memberikan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, kecermatan diperlukan bagi Indonesia untuk menangkap peluang dan memitigasi dampak negatif yang berpotensi muncul.

Trump meluncurkan kebijakan tarif

impor besar-besaran sebagai bagian dari strategi proteksionisme ekonomi yang sebelumnya telah diterapkan selama masa jabatan pertamanya. Dengan menggunakan otoritas International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Amerika Serikat menerapkan tarif dasar 10% terhadap seluruh negara, dan menetapkan tarif lebih tinggi secara selektif kepada negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak signifikan, dengan tarif atas produk ekspornya seperti otomotif, elektronik, tekstil, dan pakaian, melonjak hingga 32% dari sebelumnya hanya 0–5%.

Lantas, apakah kebijakan Trump ini menjadi ancaman atau peluang bagi Indonesia? Jika menilik sejarah kepemimpinan Trump di periode pertama, kebijakan serupa telah

memicu perlambatan ekonomi global. Pada 2019, saat AS menerapkan tarif tinggi terhadap Tiongkok dan negara-negara lain, World Trade Organization (WTO) mencatat penurunan drastis proyeksi pertumbuhan perdagangan barang global dari 2,6% menjadi 1,2%. Ketegangan ini berdampak pada menurunnya investasi bisnis, meningkatnya pengangguran, dan terganggunya stabilitas rantai pasok global. Penerapan tarif ini juga telah memperlambat pertumbuhan ekonomi AS dan dunia, serta memicu inflasi, menciptakan ketidakpastian bagi bisnis global dan menghambat investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, model ekonomi memperkirakan bahwa kebijakan tarif Trump 2025 dapat memangkas PDB AS hingga 6% dan menurunkan rata-rata upah sebesar 5%, dengan efek domino terhadap negara mitra dagang seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan bahwa dampak kebijakan ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3–0,5 poin persentase, sekaligus meningkatkan risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sektor-sektor padat karya.

Meskipun tantangan yang dihadapi sangat nyata, termasuk potensi penurunan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan volatilitas pasar finansial, situasi ini juga membuka ruang bagi Indonesia untuk melakukan reposisi strategis. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand telah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan dampak perang dagang AS–Tiongkok sebelumnya dengan meningkatkan ekspor mereka ke AS. Indonesia memiliki potensi serupa untuk mengambil alih sebagian pangsa pasar yang ditinggalkan oleh negara-negara yang terkena tarif lebih tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui

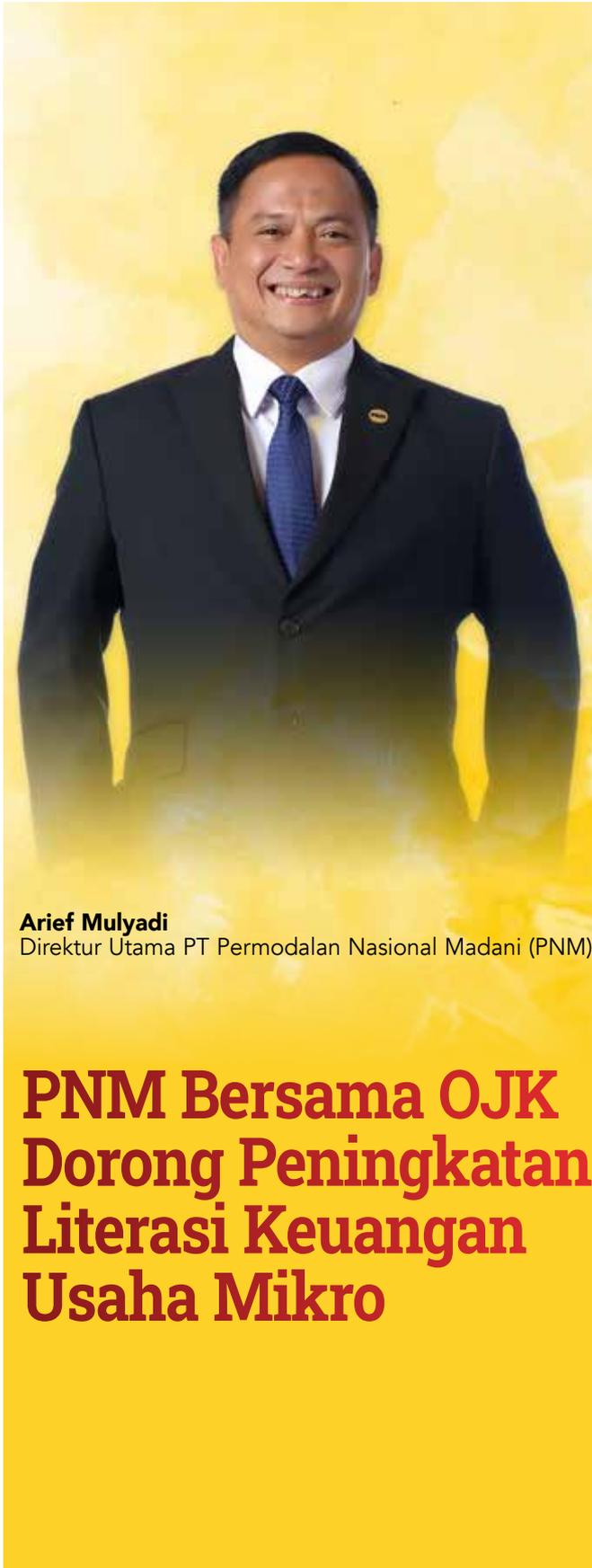
peningkatan daya saing industri nasional, investasi dalam teknologi, serta diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

Merespons dinamika tersebut, Indonesia perlu segera menyiapkan kebijakan strategis yang terintegrasi. Pemerintah diharapkan mendorong penyederhanaan regulasi ekspor, pemberian insentif bagi sektor terdampak, serta diplomasi perdagangan guna menegosiasikan penurunan tarif dengan pihak AS. Langkah lain yang tak kalah penting adalah penguatan ketahanan ekonomi domestik, termasuk melalui perbaikan infrastruktur logistik, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah,

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah juga telah mendiskusikan kebijakan tarif tersebut dengan pemerintah AS yang kemudian menghasilkan kesepakatan positif bagi kedua belah pihak. Antara lain kerja sama di bidang mineral, peningkatan mutu SDM, pengenaan tarif yang seimbang, dan lainnya. Kondisi terbaru dari perang kebijakan tarif Trump dengan Tiongkok yang menggemparkan dunia perekonomian dan melibatkan banyak negara termasuk Indonesia, mulai mereda. Kedua belah pihak sepakat untuk memangkas tarif sementara untuk menstabilkan ekonomi global.





Arief Mulyadi
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

PNM Bersama OJK Dorong Peningkatan Literasi Keuangan Usaha Mikro

Sebagai lembaga keuangan non-bank yang fokus memberdayakan pelaku usaha ultra mikro, PNM turut mendukung inisiatif OJK untuk mendorong peningkatan literasi keuangan. Terkini, OJK mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Dalam pelaksanaan program ini, OJK menggandeng *Account Officer* (AO) dari PNM sebagai mitra strategis untuk menjangkau masyarakat di tingkat komunitas akar rumput yang menjadi fokus pemberdayaan.

“Program SICANTIKS ini menjadi anugerah bagi kami di PNM karena memperkuat peran AO kami yang selama ini mendampingi lebih dari 21,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah kelompok yang kami layani mencapai lebih dari 910 ribu, dan sebagian besar adalah ibu-ibu pengusaha ultra mikro. Kami percaya, peningkatan literasi keuangan syariah dapat mempercepat proses pemberdayaan mereka,” ujar Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM.

Strategi apa saja yang sudah dan akan dilakukan PNM untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang berada di daerah terpencil atau daerah yang belum terjangkau layanan perbankan?

Untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani layanan perbankan formal, PNM mengembangkan pendekatan berbasis komunitas. Kami percaya, perubahan akan lebih mudah terjadi ketika dimulai dari lingkungan terdekat mereka sendiri. Hingga Mei 2025 PNM telah memberdayakan 537.743 ketua kelompok nasabah sebagai Mitra Pemberdaya di kelompoknya yang berperan sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga difasilitasi pelatihan kepemimpinan dan komunikasi agar mampu membimbing sesama anggota kelompok dalam mengembangkan usaha dan mengelola tantangan secara kolektif.

Untuk memperluas akses ke layanan keuangan, PNM juga telah memfasilitasi 51.796 nasabah untuk menjadi agen BRILink yang hadir hingga ke pelosok desa. Kami juga terus mendorong legalitas dan kemandirian usaha. Sebanyak 2.253.478 nasabah telah difasilitasi untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, para pengusaha bisa mengembangkan pasar, menjalin kemitraan baru, serta mengakses lebih banyak peluang pembiayaan dan pelatihan.

Apa saja kegiatan literasi keuangan yang sudah dilakukan untuk mendorong pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan PNM?

Kami percaya bahwa pelatihan bukan sekadar sesi penyampaian materi, tetapi ruang untuk tumbuh bersama. Hingga Mei 2025, PNM telah menyelenggarakan 5.411.346 sesi pelatihan dasar Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) Bermakna. Dalam setiap pertemuan, nasabah tidak hanya belajar soal keuangan, tetapi juga saling bertukar

pengalaman, memperkuat kepercayaan diri, dan membangun kapasitas usaha secara kolektif. Di sinilah semangat belajar tumbuh secara alami dari satu ibu ke ibu lainnya, dari satu kelompok kecil untuk perubahan yang lebih besar.

Selain pelatihan dasar, kami juga mendorong kolaborasi antar nasabah melalui pembentukan 583 klaster usaha. Klaster ini menjadi ruang saling berbagi pasar, pengalaman, pengetahuan, hingga membuka peluang kemitraan. Kami memfasilitasi mereka dengan forum rutin, studi banding antarwilayah, serta pertukaran praktik baik antar kelompok. Karena di balik setiap usaha kecil, tersimpan potensi besar dan potensi itu akan tumbuh lebih kuat ketika dijalani bersama, saling menopang, dan saling menginspirasi.

Sejauh mana pendekatan edukatif seperti pelatihan atau pendampingan menjadi bagian dari model bisnis PNM untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka?

Pendampingan kami lakukan secara rutin dan menyeluruh. AO PNM hadir setiap minggu di rumah atau tempat usaha nasabah, sekaligus memfasilitasi PKM Bermakna, kegiatan rutin yang menjadi ruang bersama bagi para nasabah untuk berdiskusi, membayar angsuran, serta mendapatkan materi pembinaan dan motivasi usaha. Pada kegiatan PKM tersebut, nasabah tidak hanya menjalankan kewajiban keuangan, tetapi juga mendapatkan pelatihan ringan, berbagi pengalaman, serta memperkuat solidaritas antaranggota. Kelompok menjadi ruang yang nyaman untuk belajar bersama, tumbuh bersama, dan saling menguatkan.

Dengan cara inilah, PNM hadir bukan sekadar sebagai lembaga pembiayaan, tapi sebagai sahabat tumbuh. Kami ingin setiap nasabah merasa didengar, dibimbing, dan dikuatkan. Karena kami percaya, perubahan besar tumbuh dari



keyakinan bahwa setiap ibu, setiap usaha, dan setiap mimpi punya ruang untuk tumbuh dan menginspirasi.

Bagaimana peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM yang menjadi nasabah PNM?

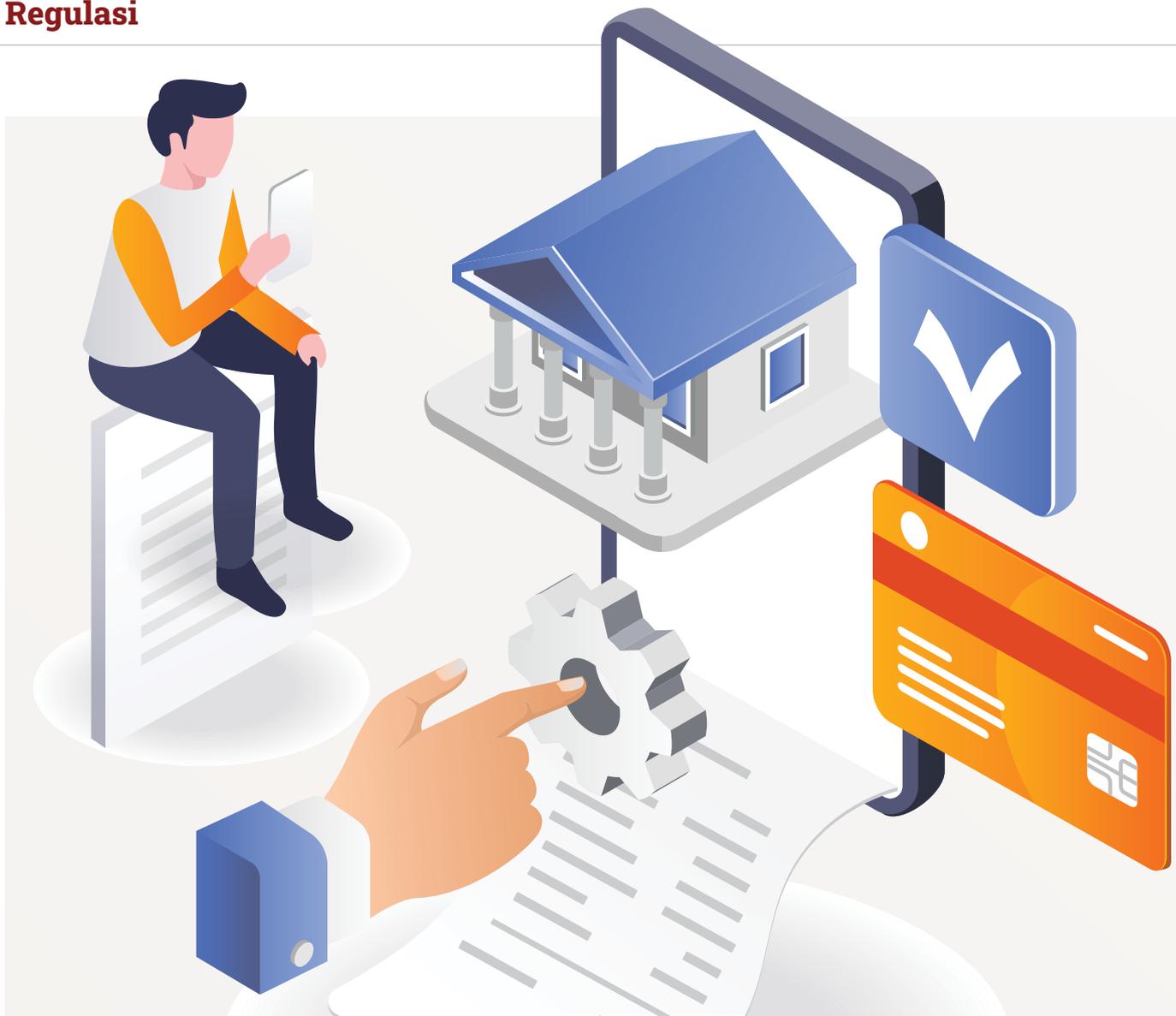
Berbagai bentuk pemberdayaan yang kami lakukan, mulai dari PKM Bermakna, pelatihan, hingga pendampingan intensif oleh AO, telah memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan usaha para nasabah PNM Mekaar. Melalui literasi keuangan yang terus diberikan, para nasabah kini lebih paham cara mengelola keuangan secara sederhana namun efektif, baik untuk kebutuhan usaha maupun rumah tangga. Mereka juga belajar mencatat pemasukan dan pengeluaran, memahami pentingnya memisahkan uang usaha dan uang pribadi, hingga mampu mengambil keputusan finansial dengan lebih bijak.

Salah satu inisiatif yang memperkuat proses pembelajaran dan pemberdayaan tersebut adalah kegiatan studi banding yang kami kemas dalam tajuk

#SehariBerbagiInspirasi. Beberapa waktu lalu, puluhan ketua kelompok nasabah PNM Mekaar dari Cirebon dan Padang kami ajak melakukan kunjungan langsung ke Pabrik Bolu Susu Lembang bersama pengusaha lokal ternama. Mereka belajar langsung dari proses produksi, pengelolaan bisnis, hingga strategi pemasaran. Tidak hanya itu, mereka juga ikut merasakan pengalaman menenun songket dalam rangka mengapresiasi kearifan lokal dan semangat berkarya.

Terakhir, apa harapan PNM terhadap literasi dan inklusi keuangan di tahun 2025 ini?

Kami bersyukur, capaian literasi dan inklusi keuangan nasional menunjukkan tren yang meningkat. Harapan kami, melalui pendekatan yang konsisten dan menyentuh akar rumput, literasi keuangan tidak hanya menjadi program, tetapi tumbuh menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat. Karena ketika perempuan melek finansial, mereka bukan hanya mampu mengelola keuangan keluarga dengan bijak tetapi mereka juga menjadi penggerak ekonomi dan agen perubahan di komunitasnya.



OJK Terbitkan POJK Terbaru untuk Bank Kustodian dan SEOJK untuk BPR

Pada bulan Maret 2025, OJK menerbitkan dua aturan baru untuk mendukung industri perbankan yakni POJK Nomor 7 Tahun 2025 dan SEOJK Nomor 2 Tahun 2025.

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas bisnis di industri jasa keuangan. Terdapat irisan kelembagaan maupun proses bisnis lintas sektor, seperti bidang sektor pengawasan perbankan tumpang tindih dengan sektor pengawasan pasar modal maupun dengan sektor pengawasan perasuransian. Hal tersebut berpotensi

menimbulkan adanya ketentuan pengaturan yang juga beririsan di antara bidang sektor pengawasan, di antaranya pengaturan terkait pelaporan bank kustodian.

Karena itulah OJK memperbarui Peraturan OJK (POJK) terkait Laporan Bank Umum sebagai Kustodian yang sebelumnya sudah pernah diatur dalam POJK 24/POJK.04/2017. Bank

kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. Adapun yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank kustodian juga merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan reksa dana.

Dalam Peraturan OJK terbaru POJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, bank kustodian diwajibkan untuk melapor mengenai kegiatan operasional mereka, termasuk laporan berkala dan insidental. Laporan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga integritas pasar modal, dan melindungi kepentingan investor guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, transparan dan akuntabel.

Dalam pembaruan POJK ini, juga diatur tata cara penyampaian laporan berkala dan laporan insidental, termasuk mekanisme koreksi atas laporan yang disampaikan. Penegasannya terletak pada pencabutan Pasal 39 huruf d pada Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, terkait kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan.

POJK ini akan mulai berlaku setelah sembilan bulan sejak diundangkan, yaitu setelah 27 Maret 2025.

Sementara itu, OJK juga telah memperbarui Surat Edaran OJK (SEOJK) bernomor 2 tahun 2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). SEOJK ini menggantikan SEOJK Nomor 8 tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan SEOJK Nomor 24 tahun 2019 tentang perubahan atas SEOJK Nomor 8 tahun 2016 yang berisi tentang Kewajiban

atau yang sekarang dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang fokus pada usaha menghimpun dan menyalurkan dana, terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas (kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing), dan perasuransian (kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama), dan lain sebagainya sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang



Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Terbitnya SEOJK terbaru ini bertujuan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan BPR, sehingga tercipta BPR yang stabil dan kompetitif untuk dapat memberi kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat)

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun, BPR dapat bekerja sama dengan bank umum dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM. Sederhananya, BPR hanya menerima simpanan nasabah dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.



Raup Cuan dari Jual Produk Digital

Produk digital kini menjadi salah satu jenis bisnis yang populer karena menawarkan fleksibilitas dalam produksi dan distribusi. Dengan modal awal yang relatif kecil, namun dapat menciptakan produk yang menghasilkan pendapatan pasif dalam jangka panjang.

Perlahan tapi pasti dunia bisnis berkembang ke era digital. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya *marketplace* di Indonesia, yaitu wadah untuk menyajikan aneka

produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital, mulai dari harga terendah hingga harga tertinggi.

Menjual produk digital berpotensi menghasilkan pendapatan. Hadirnya

produk digital ini memiliki keuntungan ganda. Pertama, tidak ada pengiriman yang menggunakan jasa pengiriman. Kedua, tidak perlu melakukan penyimpanan atau persediaan produk. Sehingga, produk digital dianggap produk yang relatif mudah dikembangkan bagi pemula yang ingin menjalankan bisnis.

Produk digital sendiri adalah produk yang berbentuk digital alias elektronik. Produk tersebut seperti perangkat lunak atau *software*, tiket, video tutorial, hingga *e-book*. Tidak hanya produk, jasa juga dapat dikategorikan dalam bentuk digital.

Berbeda dengan produk fisik, produk digital tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Sebaliknya, mereka ada dalam bentuk digital yang dapat

diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau tablet.

Lalu, apa saja produk digital yang dapat menjadi lahan bisnis? Berikut adalah 10 contoh produk digital yang dapat dibuat dan dijual, beserta cara memonetisasinya.

1. E-Book

E-book adalah buku dalam format elektronik yang dapat dibaca di perangkat seperti *Kindle*, tablet, atau *smartphone*.

- Cara membuat produk digital *e-book*: Pilih topik yang relevan dan sesuai dengan keahlian. Gunakan *software* seperti Microsoft Word atau Google Docs untuk menulis, lalu konversikan ke format PDF atau EPUB.
- Cara menjual produk digital *e-book*: Publikasikan di platform seperti Amazon Kindle, Google Play Books, atau melalui situs pribadi.

2. Kursus *Online*

Kursus *online* mencakup video, dokumen, dan latihan interaktif untuk pembelajaran mandiri.

- Cara membuat: Gunakan alat seperti Teachable atau Udemy untuk membuat dan mengelola kursus. Rancang modul berdasarkan tingkat kesulitan, mulai dari dasar hingga lanjutan.
- Cara menjual: Gunakan media sosial dan iklan *online* untuk menjangkau target *audiens*. Berikan diskon awal untuk menarik pelanggan baru.

3. Template Desain

Template desain, seperti untuk presentasi, CV, atau konten media sosial, sangat diminati oleh profesional dan kreator.

- Cara membuat: Gunakan *software* desain seperti Canva atau Adobe Illustrator untuk membuat *template* yang menarik.

- Cara menjual: Tawarkan di platform seperti Creative Market, Etsy, atau situs pribadi.

4. Musik dan Efek Suara

Musik atau efek suara untuk video, *podcast*, atau *game* memiliki pasar yang terus berkembang.

- Cara membuat: Gunakan *software* produksi audio seperti GarageBand atau FL Studio untuk menciptakan karya audio.
- Cara menjual: Jual lisensi di situs seperti AudioJungle, Pond5, atau Bandcamp.

5. Aplikasi *Mobile*

Aplikasi *mobile* dapat berupa *game*, alat produktivitas, atau aplikasi edukasi.

- Cara membuat: Jika tidak memiliki keterampilan *coding*, gunakan platform seperti AppGyver atau Glide.
- Cara menjual: Publikasikan di Google Play Store dan Apple App Store. Tambahkan model monetisasi seperti pembelian dalam aplikasi atau iklan.

6. Foto dan Video Stok

Foto atau video stok digunakan oleh kreator konten untuk memperindah proyek mereka.

- Cara membuat: Gunakan kamera berkualitas tinggi dan edit dengan *software* seperti Adobe Lightroom.
- Cara menjual: Tawarkan karya di platform seperti Shutterstock, iStock, atau Adobe Stock.

7. *Software* dan *Plugin*

Software dan *plugin* dapat membantu pengguna meningkatkan produktivitas atau menambahkan fitur baru ke sistem mereka.

- Cara membuat: Jika memiliki keterampilan pemrograman, kembangkan solusi unik untuk masalah tertentu.
- Cara menjual: Jual lisensi di situs seperti CodeCanyon atau langsung melalui situs pribadi.

8. Langganan *Newsletter Premium*
Newsletter premium berisi konten eksklusif seperti analisis pasar, tips profesional, atau berita industri.

- Cara membuat: Gunakan platform seperti Substack untuk mengelola dan mengirimkan *newsletter*.
- Cara menjual: Pasarkan melalui media sosial dan blog pribadi, berikan pratinjau gratis untuk menarik pelanggan.

9. *Game* Digital

Game digital, terutama yang berbasis browser atau platform *mobile*, sangat diminati oleh berbagai kalangan usia.

- Cara membuat: Gunakan alat seperti Unity atau Unreal Engine untuk mengembangkan *game*.
- Cara menjual: Publikasikan di Steam, Epic Games Store, atau platform *game* lainnya. Tambahkan opsi pembelian dalam *game* untuk pendapatan tambahan.

10. NFT (*Non-Fungible Token*)

NFT adalah aset digital unik yang dapat berupa seni digital, musik, atau video.

- Cara membuat: Gunakan platform seperti OpenSea atau Rarible untuk membuat dan mendaftarkan NFT.
- Cara menjual: Jual di marketplace NFT, gunakan media sosial dan komunitas kripto untuk promosi.

Produk digital adalah solusi bisnis modern yang memberikan fleksibilitas tinggi dan potensi keuntungan besar. Dari *e-book* hingga NFT, banyak pilihan untuk menjelajahi kreativitas dan keahlian. Dengan memahami kebutuhan pasar dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, mulailah bisnis produk digital yang sukses.



Fenomena Konsumen Borong Emas, Investasi Emas Masih Relevan atau Tidak?

Setelah lebaran, sempat ramai orang berburu emas hingga antriannya mengular. Ditengarai hal ini terjadi akibat adanya “diskon” harga emas yang menjadi daya tariknya. Apa yang sebenarnya terjadi, apakah investasi emas saat ini masih relevan? Bagaimana seharusnya konsumen menanggapi fenomena ini?

Beberapa faktor yang memicu terjadinya fenomena borong emas oleh konsumen dimulai dari ketidakpastian ekonomi global seperti perang dagang dan ketegangan geopolitik yang memicu fluktuasi harga komoditas. Hal tersebut menciptakan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya inflasi yang berujung kerugian jika tidak memiliki aset safe

haven. Sehingga masyarakat berpikir untuk sesegera mungkin berinvestasi emas yang dianggap lebih stabil dan aman dibandingkan dengan jenis investasi lainnya seperti saham atau obligasi.

Tren borong emas semakin mencolok ketika kondisi masyarakat yang sudah khawatir berpadu dengan perilaku *fear of missing out* atau lebih

dikenal dengan sebutan FOMO. Mengakibatkan antrian mengular yang tidak biasa terjadi di gerai-gerai penjualan emas. Investor emas regular bercampur dengan golongan orang yang hanya ikut-ikutan. Alhasil, harga emas makin meroket, karena tingginya permintaan sementara stok yang tersedia sangat terbatas.

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menyoroti fenomena perilaku masyarakat yang berbondong-bondong membeli emas di saat harganya justru naik. Listya mengatakan, tak sedikit masyarakat yang memborong emas hanya sekadar ikut-ikutan. “Fenomena aksi borong emas saat harga sedang tinggi

merefleksikan adanya bias kognitif seperti *herding behavior*—perilaku ikut-ikutan—dan FOMO atau ketakutan akan kehilangan peluang yang sedang dinikmati orang lain,” kata Listya.

Namun, kenaikan harga emas tidak semata-mata didorong oleh perhitungan rasional berbasis nilai intrinsik atau teori portofolio saja. Faktor pendekatan *behavioral economics* oleh perilaku psikologis investor yang sering kali menyimpang dari logika ekonomi konvensional, ikut memberi kontribusi.

Ketika harga emas mencetak rekor demi rekor, hingga terjadi rekor tertinggi harga emas, investor—dalam hal ini masyarakat—cenderung menganggap tren akan terus berlangsung. Akibatnya, keputusan membeli emas lebih didorong oleh tekanan sosial dan sinyal pasar ketimbang analisis fundamental.

Tren ramai-ramai beli emas ini sejalan dengan temuan ekonom Robert J. Shiller pada 2015, yang menyatakan bahwa sentimen kolektif pasar sangat berpengaruh dalam membentuk gelembung aset (*asset bubbles*). Menurutnya, fenomena ini disebut *extrapolation bias*, kecenderungan memperkirakan masa depan hanya berdasarkan data masa lalu jangka pendek.

Konsep *loss aversion* dari teori prospek (*prospect theory*) oleh Kahneman dan Tversky juga menjelaskan perilaku investor yang cenderung lebih takut mengalami kerugian ketika inflasi meningkat atau krisis global membayangi, dibandingkan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan.

Akhirnya investor mencari instrumen yang dirasa aman sebagai simbol kestabilan dan menjadi pilihan paling intuitif. Dalam situasi seperti ini, keputusan membeli emas bahkan ketika harganya tinggi merupakan bentuk dari keengganan menghadapi

kerugian nilai riil dari aset lain. Pada saat yang sama, media sosial turut memperkuat efek *confirmation bias*, di mana narasi-narasi optimis terhadap emas tersebar luas dan memperkuat keputusan emosional kolektif. Implikasinya, keputusan investasi masyarakat sering kali berada di persimpangan antara logika dan psikologi.

Meski demikian, berinvestasi emas

akan selalu aman sepanjang masa. Hanya saja konsumen mesti lebih bijak dalam merespon tren apapun terkait emas, seperti tren yang saat ini terjadi. Selain itu, penting bagi OJK selaku regulator untuk makin menggiatkan literasi keuangan masyarakat agar keputusan berinvestasi jadi lebih berdasar dan berjangka panjang. Bukan sekadar respons emosional terhadap gejolak sesaat di pasar.



Konsumen Tanya Premi Asuransi

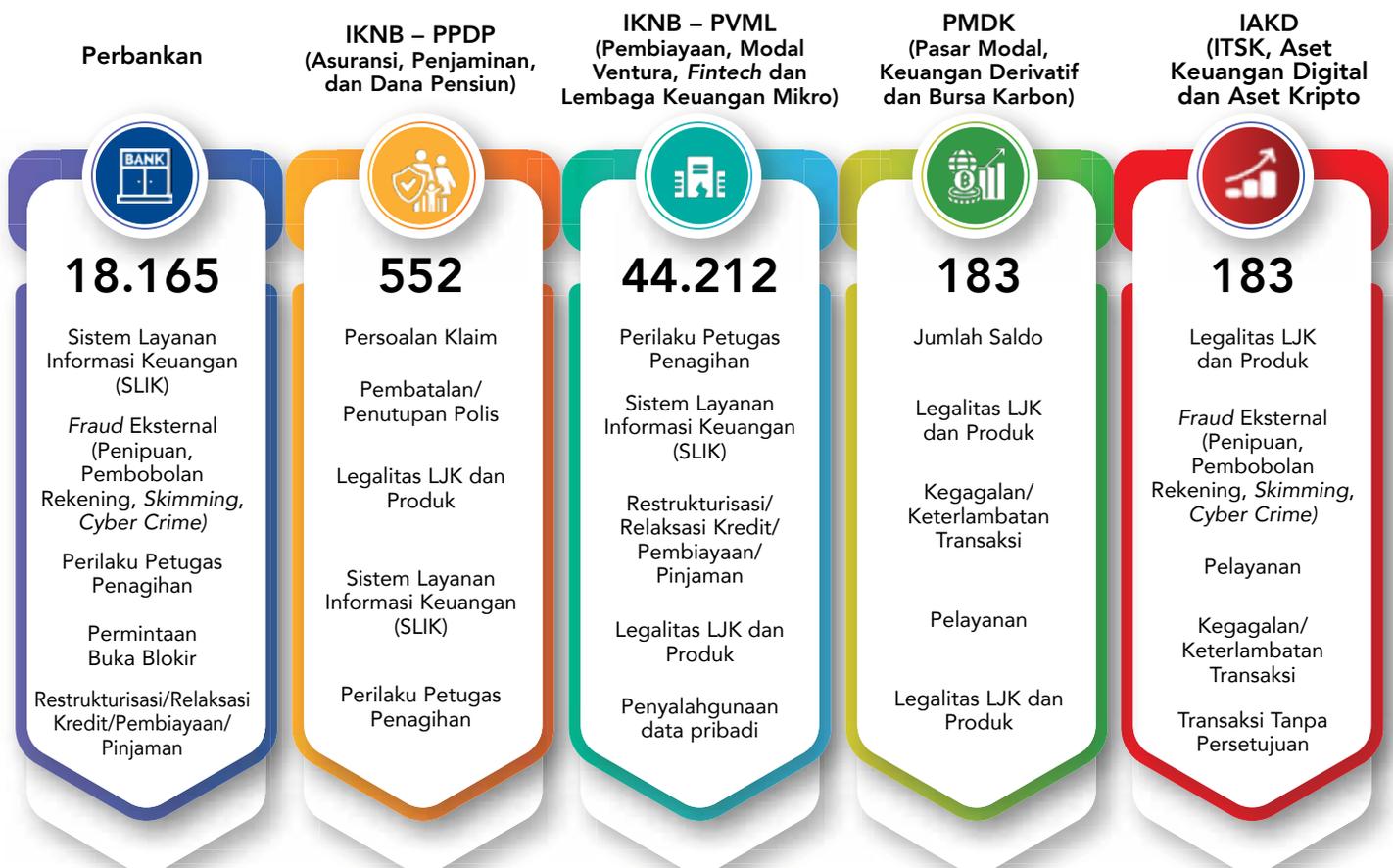
OJK menerima 74.596 layanan konsumen pada periode April hingga Juni 2025. Layanan tersebut terdiri dari 63.184 pertanyaan dan 11.412 pengaduan. Adapun tiga produk teratas yang banyak ditanyakan adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan sebanyak 123.125 pertanyaan, mengenai Perilaku Petugas Penagihan sebanyak 18.431 pertanyaan, dan mengenai Fraud Eksternal sebanyak 6.788. Terdapat juga tiga produk teratas yang banyak mendapat pengaduan konsumen, yakni Perilaku Petugas Penagihan sebanyak 3.460, Sistem Layanan Informasi Keuangan sebanyak 1.640, dan pengaduan Relaksasi Kredit sebanyak 1.636.

OJK juga mencatat informasi pertanyaan mengenai mekanisme buka blokir rekening bank. Pihak bank menginformasikan bahwa pemblokiran tersebut merupakan permintaan OJK karena terlibat dengan judi *online*. Konsumen menerangkan bahwa sebelumnya rekening tersebut dipinjam temannya untuk aktivitas judi *online* namun pada saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk aktivitas tersebut.

Konsumen juga menanyakan terkait polis asuransi. Konsumen menyampaikan bahwa memiliki polis asuransi dengan ketentuan kenaikan premi sebesar 5-15% per tahun. Namun pada tahun 2025, pihak asuransi secara sepihak meminta kenaikan sebesar 54% dari tahun sebelumnya dan berdalih bahwa OJK yang memberi aturan untuk premi asuransi wajib naik tersebut. Konsumen menyampaikan pertanyaan mengenai ketentuan yang mendasari kenaikan premi tersebut.

Berdasar data di atas, OJK akan terus melakukan tindakan perlindungan konsumen melalui langkah preventif, maupun kuratif. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, Whatsapp 081157157157 dan email konsumen@ojk.go.id. OJK juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih cermat dan teliti dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cara ini terus dilakukan agar konsumen di Indonesia terlindungi dengan baik.

Data Layanan dan Kontak OJK Data Pertanyaan Tahun 2025 Periode 1 April – 30 Juni 2025



Penggunaan kartu kredit mungkin menawarkan berbagai kemudahan tersendiri dalam bertransaksi, namun tanpa adanya pengelolaan yang tepat, fasilitas ini justru bisa menjadi jebakan yang membahayakan keuangan. Mengatur arus kas atau *cash flow* pada saat menggunakan kartu kredit merupakan hal penting agar tidak sampai terjerat utang dengan bunga yang cukup tinggi.

Manfaatkan Kartu Kredit untuk Atur Keuanganmu

Transaksi keuangan menggunakan kartu masih menjadi pilihan masyarakat hingga kini, salah satunya kartu kredit. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran nontunai untuk mempermudah transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Melalui kartu kredit nasabah dapat berbelanja terlebih dahulu, lalu membayarnya kemudian dengan cara cicil.

Selain karena beberapa jenis kartu kredit dapat digunakan untuk bertransaksi di *merchant* luar negeri, program promo yang ditawarkan bank penerbit juga menjadi alasan masyarakat untuk memiliki kartu ini. Oleh sebab itu, pengguna harus bijak

dalam menggunakan kartu kredit sesuai kebutuhan. Jika digunakan dengan bijak, kartu kredit dapat sangat membantu dalam mengelola anggaran bulanan. Berikut adalah tips menggunakan kartu kredit dengan bijak:

1. **Pilih Kartu Kredit Sesuai Kebutuhan**
Tentukan untuk apa kartu kredit akan digunakan, apakah untuk belanja, perjalanan, bisnis, atau kebutuhan sehari-hari. Mengetahui kebutuhan utama akan membantu dalam memilih kartu yang menawarkan manfaat maksimal untuk aktivitas tersebut.
2. **Bayar Tagihan Tepat Waktu**
Selalu bayar tagihan kartu kredit tepat waktu jika tidak ingin dikenakan denda keterlambatan.
3. **Lunasi Tagihan**
Usahakan untuk selalu membayar penuh tagihan bulanan untuk menghindari bunga dan utang yang menumpuk. Pembayaran minimum membuat saldo terutang tetap besar, sehingga bunga yang dikenakan setiap bulan akan terus meningkat.
4. **Batasi Penggunaan**
Tentukan jumlah penggunaan kredit yang masuk akal berdasarkan pendapatan dan kebutuhan bulanan. Hal ini membantu menghindari pembelanjaan yang tidak terkendali.
5. **Hindari Tarik Tunai**
Tarik tunai menggunakan kartu kredit biasanya dikenakan biaya transaksi yang tinggi, yang dapat mengurus keuangan lebih cepat. Bunga yang dikenakan untuk tarik





dari transaksi belanja. Uang yang dikembalikan biasanya tidak dalam bentuk tunai, tetapi dikreditkan ke dalam tagihan sehingga mengurangi total tagihan. Tak ketinggalan adalah program *reward* poin, dari tiap kelipatan transaksi belanja mendapatkan poin yang bisa diakumulasi dan ditukarkan dengan berbagai hadiah.

10. Batasi Kepemilikan Kartu

Memiliki terlalu banyak kartu kredit bisa menyulitkan dalam memantau pengeluaran pada setiap kartu. Agar pengelolaan keuangan lebih mudah dan tidak menumpuk utang, sebaiknya Anda membatasi jumlah kartu kredit yang dimiliki. Memiliki kartu kredit lebih dari satu sebenarnya boleh saja, asalkan Anda bisa disiplin dalam membayar semua tagihan.

tunai juga biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi pembelian biasa.

6. Gunakan untuk Pembelian Penting
Gunakan kartu kredit untuk pembelian barang produktif yang penting dan tahan lama, bukan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.
7. Perhatikan Biaya dan Bunga
Pastikan untuk mengetahui tingkat bunga, besaran biaya, dan denda yang berlaku untuk kartu kredit. Laporan tagihan bulanan bisa dibaca menggunakan aplikasi resmi bank dikeluarkannya kartu kredit untuk memeriksa informasi biaya dan bunga.
8. Atur Arus Kas dengan Baik
Pengguna memiliki fleksibilitas untuk mengatur waktu pembayaran sesuai dengan arus kasnya.
9. Manfaatkan *Reward* dan *Cashback*
Kartu kredit juga memberikan program belanja hemat seperti *cashback*, yaitu pengembalian uang sejumlah persentase tertentu

Tidak semua orang bisa memiliki kartu kredit karena terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut syarat memiliki kartu kredit menurut ketentuan Bank Indonesia (BI):

1. Pemegang kartu kredit utama harus sudah berumur 21 tahun atau telah menikah. Sementara, pemegang kartu kredit tambahan berumur minimal 17 tahun.
2. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah Rp3 juta.
3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang dengan penghasilan antara Rp3 juta hingga Rp10 juta antara lain:
 - Jumlah maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah 2 penerbit kartu.
 - Jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada 1 pemegang kartu kredit adalah 3 kali penghasilan bulanan (dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya).
 - Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan di atas Rp10 juta per bulan.

Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan *risk appetite* masing-masing. Nasabah yang ingin memiliki kartu kredit juga perlu memastikan riwayat keuangan aman atau tidak pernah mengalami kredit macet sebelumnya. Bank akan memeriksa dengan cermat kondisi riwayat keuangan calon pengguna kartu kredit, sehingga akan ada kemungkinan pengajuan ditolak pihak bank. Sejak awal juga perlu diperhitungkan bagaimana cara pembayaran cicilan.

Perkembangan Bursa Karbon Sepanjang 2024

REKAPITULASI VOLUME TRANSAKSI UNIT KARBON PERIODE SEPTEMBER 2023 - DESEMBER 2024

Total Volume Transaksi Pasar Reguler (Regular Market) - 142.832 tCO₂e

Total Volume Transaksi Pasar Negosiasi (Negotiation Market) - 462.797 tCO₂e

Total Volume Transaksi Pasar Lelang (Auction Market) - 300.000 tCO₂e

Total Volume Transaksi Marketplace (Marketplace) - 2.389 tCO₂e

Total Volume Transaksi Seluruh Pasar (All Market) - 908.018 tCO₂e

Rekapitulasi Nilai Transaksi Unit Karbon Periode September 2023 - Desember 2024

Total Nilai Transaksi Pasar Reguler (Regular Market) - Rp10.026.118.600 miliar

Total Nilai Transaksi Pasar Negosiasi (Negotiation Market) - Rp21.978.858.823 miliar

Total Nilai Transaksi Pasar Lelang (Auction Market) - Rp18.478.800.000 miliar

Total Nilai Transaksi Marketplace (Marketplace) - Rp152.528.000 juta

Total Nilai Transaksi Seluruh Pasar (All Market) - Rp50.636.305.423 miliar

Profil Bursa Karbon Indonesia:

| | |
|------------------|---|
| Resmi beroperasi | : 26 September 2023 |
| Penyelenggara | : Bursa Efek Indonesia |
| Pengawas | : Otoritas Jasa Keuangan |
| Jenis produk | : PTBAE-PU dan SPE-RGK |
| Nilai transaksi | : Rp50,64 miliar (akhir Desember 2024) |
| Volume Transaksi | : 908.018 ton CO ₂ e |
| Jumlah Penjual | : PT Pertamina Geothermal Energy (Proyek Lahendong Unit 5 & Unit 6) PT PLN Nusantara Power (PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang) PT PLN Indonesia Power (PLTM Gunung Wudul) |
| Pembeli | : 75 entitas (Agustus 2024) |
| Jumlah Pengguna | : 100 pengguna (akhir Desember 2024) |

Indonesia akhirnya mempunyai bursa karbon setelah diresmikan pada 26 September 2023. Sejak saat itulah, transaksi di bursa karbon Indonesia mulai dilakukan. Bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/ atau catatan kepemilikan unit karbon. Sedangkan definisi perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Terhitung hingga Desember 2024, total pengguna jasa bursa karbon telah mencapai 100 pengguna jasa, sebanyak 16 pengguna jasa bursa karbon adalah emiten dan perusahaan publik, dan 4 pengguna jasa merupakan *seller*/penyuplai unit karbon. Jumlah pengguna jasa bursa karbon yang melakukan transaksi perdagangan karbon di Indonesia terdapat 41 pengguna jasa dan sisanya sebanyak 59 pengguna jasa bursa

karbon tercatat belum melakukan transaksi.

Sementara itu, akumulasi nilai transaksi perdagangan karbon pada periode September 2023 - Desember 2024 dari seluruh pasar mencapai Rp50,64 miliar dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 908.018 ton CO₂e, dan frekuensi transaksi perdagangan karbon yang terjadi sebanyak 152 kali.

Manfaat Anjak Piutang sebagai Solusi Pendanaan

Anjak piutang menjadi opsi pembiayaan jangka pendek atau modal kerja alternatif, serta cara efisien dalam mengelola administrasi tagihan dan penjualan bagi penjual piutang (klien). Lalu bagaimana mekanismenya? Anjak piutang di Indonesia telah diatur sejak tahun 1988 dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988. Peraturan ini mengukuhkan anjak piutang sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Sejak itulah konsep anjak piutang diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia melalui perusahaan pembiayaan.

Di dunia bisnis, istilah anjak piutang lebih umum disebut *factoring*. Biasanya dilakukan ketika perusahaan atau pengusaha mengalami kerugian akibat arus kas macet. Penyebabnya bisa karena piutang yang tidak tertagih. Solusinya perusahaan atau pengusaha mungkin akan mencari sumber dana untuk mengatasinya, anjak piutang inilah alternatifnya.

Apakah anjak piutang legal? Tentu saja, Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan yang mengesahkan anjak piutang pertama kali itulah yang menjadi dasar hukumnya. Adapun penguatan dasar hukum lain untuk anjak piutang juga telah tertuang pada Pasal 6 huruf (1) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Keppres No. 81 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Penentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Presiden (PP) No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Lalu apa bedanya anjak piutang dengan pembiayaan piutang? Keduanya sama-sama berfungsi memperlancar arus kas perusahaan. Namun, dari sisi biaya, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang lebih besar dari anjak piutang, sebab dalam pembiayaan piutang terdapat *fee* dan bunga. Lalu dari sisi proses, penagihan anjak piutang jauh lebih mudah dilakukan sebab perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan kepada pihak pemilik piutang, karena



pihak investor lah yang nantinya akan melakukan penagihan.

Selain memperlancar arus kas, anjak piutang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan tugas penagihan. Maksudnya penagihan piutang yang macet akan dilakukan oleh perusahaan jasa anjak piutang. Termasuk risikonya, sebab dalam perjanjian anjak piutang pengusaha boleh memindahkan risiko gagal tagih kepada perusahaan jasa anjak piutang. Sehingga pengusaha dapat mempercepat proses produksi usahanya dengan terbayarnya piutang yang macet tadi.

Konsep anjak piutang ini bermanfaat bagi bisnis kecil seperti UMKM. Risiko yang relatif kecil, proses yang lebih mudah dibanding jenis pinjaman lain, dan biaya yang dapat ditekan membuat anjak piutang sesuai bagi UMKM. Misalnya sebuah UMKM terkendala kredit macet, faktur penjualannya banyak yang tidak terbayarkan. Solusinya, UMKM tersebut dapat mengalihkan penagihan faktur kepada pihak ketiga yakni perusahaan anjak piutang untuk mendapatkan dana tunai lebih cepat. Sebab penagihan faktur akan dilakukan oleh perusahaan anjak piutang tersebut.

Jika Anda membutuhkan jasa anjak piutang, kenali jenis-jenis anjak piutang berikut agar lebih efektif dan efisien.

- **Full Service Factoring**
Jenis anjak piutang ini yang paling umum dipilih pengusaha. Jenis anjak piutang ini menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan *invoice*, sampai penerimaan dana dari debitur. *Full-service factoring* juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet (*bad debt*).
- **Resource Factoring**
Merupakan perusahaan jasa anjak piutang mirip dengan

full service factoring. Bedanya, *resource factoring* tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan *bad debts*. Penagihan terhadap *bad debts* akan tetap dilakukan, tapi risiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien.

- **Bulk Factoring**
Jenis anjak piutang yang hanya menyediakan kegiatan pembayaran di muka (*down payment*) dan penagihan periodik kepada debitur.
- **Maturity Factoring**
Jenis anjak piutang satu ini hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien.
- **Agency Factoring**
Jenis anjak piutang dengan mengatasmakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa *factoring* jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam *invoice* penagihan. Meski demikian, proses teknis penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri.

- **Invoice Discounting Factoring**
Perusahaan jasa anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jenis anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri, dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa *factoring*.
- **Undisclosed Factoring**
Jenis anjak piutang yang terakhir adalah *undisclosed factoring*, yaitu perusahaan jasa anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap *bad debts*. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi *bad debts*. Jadi, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa *factoring* pilihan Anda.



Urgensi Sertifikasi bagi Bisnis UMKM

Bagi pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memproduksi barang yang berkualitas saja tidaklah cukup di era persaingan ketat saat ini. Karena itulah dibutuhkan sertifikasi resmi agar meningkatkan daya saingnya.

Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Menko Perekonomian, UMKM berkontribusi signifikan lebih dari 60% terhadap PDB, menyerap 97% tenaga kerja, dan berperan dalam pemerataan ekonomi. Beberapa UMKM berhasil mengekspor produknya ke pasar internasional yang mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor, sehingga berkontribusi pada peningkatan devisa



negara. Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan potensi bisnis UMKM dapat mencapai US\$130 miliar atau Rp2.194 triliun (asumsi kurs Rp16.879 per dolar AS) pada 2025.

Namun, potensi besar tersebut diiringi pula dengan tantangan besar yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM. Salah satunya, persaingan ketat baik di kancah nasional maupun internasional. Solusinya, pelaku UMKM diharapkan dapat mengurus sertifikasi resmi. Sebab, memiliki produk berkualitas saja tidak cukup.

Sayangnya, berdasarkan data Kementerian UMKM per Desember 2024, jumlah UMKM sebanyak 65,5 juta unit, belum semuanya memiliki sertifikasi resmi. Padahal pemerintah bersama pihak terkait sudah berupaya mendorong percepatan penerbitan sertifikasi. Pelaku bisnis UMKM perlu menyadari pentingnya mengantongi sertifikat resmi untuk meningkatkan kredibilitas produk dan usaha, agar mudah mengakses pasar yang lebih luas. Sertifikat juga bermanfaat untuk memastikan pelaku telah memproduksi barang dengan standar kualitas, keamanan, dan legalitas yang sesuai regulasinya, sehingga konsumen merasa aman.

Lantas, apa saja jenis sertifikat yang perlu diurus oleh pelaku bisnis UMKM?

Pertama, Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal UMKM. Dengan NIB, UMKM bisa mendapatkan akses ke perizinan usaha, pembiayaan, hingga fasilitas dari pemerintah. Sertifikat ini bersifat wajib, dan pelaku usaha bisa mendapatkannya dengan mendaftar pada sistem OSS (*Online Single Submission*) melalui oss.go.id.

Kedua, sertifikasi halal khususnya untuk produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sertifikat halal bersifat wajib. Pelaku bisnis UMKM



bisa mendaftarkan produknya ke dipersilakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ketiga, sertifikat PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) untuk keamanan pangan yang ditujukan bagi pelaku UMKM kuliner. PIRT adalah izin yang diberikan kepada produk makanan dan minuman yang diproduksi secara rumahan dan dijual dalam kemasan. Sertifikat ini juga bersifat wajib, jadi pelaku usaha di bidang ini harus mengajukan permohonan sertifikatnya ke Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Namun, sertifikat PIRT hanya berlaku untuk produk dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Jika produk termasuk ke dalam pangan yang harus segera dikonsumsi, maka wajib memiliki sertifikasi lain yakni Sertifikat Laik Higiene/Sehat dari Dinas Kesehatan setempat.

Keempat, sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai jaminan kualitas produk. Sertifikasi SNI menjadi penanda produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

untuk keamanan konsumen. Karena itulah pelaku usahanya wajib mengurus sertifikat ini ke BSN atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Kelima, sertifikat BPOM untuk produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bertugas memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik aman dikonsumsi dan bebas bahan berbahaya. Pelaku usaha di bidang ini dipersilakan mendaftar ke BPOM untuk mendapatkan legalitasnya.

Terhitung selama triwulan I 2025, data Kementerian UMKM mencatat telah menerbitkan 739.843 NIB. Sehingga total NIB yang telah terbit sebanyak 12,27 juta atau sekitar 80,2% dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada tahun 2029. Untuk sertifikasi halal pun juga sudah mencapai sekitar 162.754 produk dari target nasional 2025 sebesar 3,5 juta. Untuk sertifikasi SNI, sebanyak 94.530 telah terbit. Sementara, sertifikasi BPOM telah mencapai 6.173 untuk produk suplemen kesehatan dengan pemberlakuan nomor izin edar.

Waspada Jerat *Paylater*, Belajar dari Novel “*Pay Sooner or Later*”

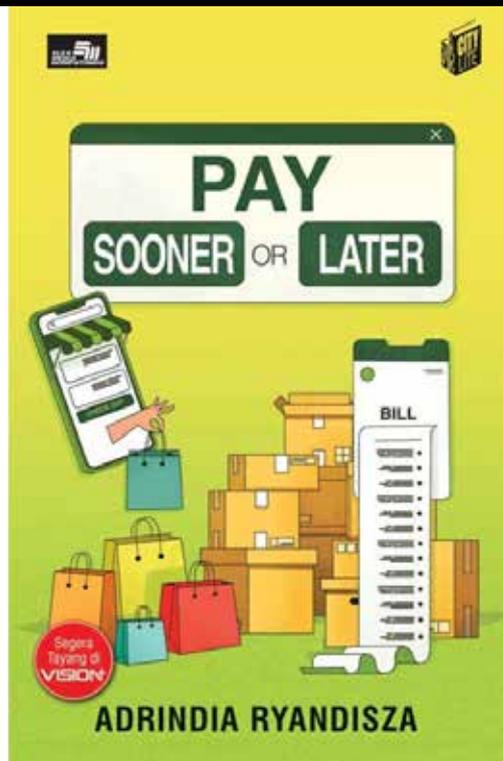
Sekilas *paylater* terlihat sebagai solusi bagi konsumen, namun di balik kemudahannya, jerat *paylater* dapat menyengsarakan. Belajar dari tokoh Tika di novel “*Pay Sooner or Later*”. Yuk putus kebiasaan belanja pakai *paylater* agar kondisi finansial makin membaik!

“*Pay Sooner or Later*” bercerita tentang tokoh Tika. Tika seorang wanita metropolitan yang bekerja disebuah konsultan pajak, punya kebiasaan tidak sehat berbelanja *online*, yakni selalu menggunakan metode *paylater* (beli sekarang bayar nanti). Tika selalu merasa senang ketika *check out* barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuh. Hidupnya jadi runyam ketika kontrak kerjanya tidak diperpanjang karena politik kantor. Otomatis Tika tidak punya penghasilan.

Untungnya dia dapat pekerjaan baru sebagai *desk collector* (penagih utang) di sebuah pinjol (pinjaman *online*). Alih-alih menabung dan melunasi cicilan, dia malah merayakannya dengan menambah utang. Selain kelimpungan mengurus utangnya sendiri, Tika pun harus mengurus utang orang lain.

Dari cerita Tika kita belajar bahwa layanan *paylater* yang kerap dianggap sebagai solusi instan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan bisa berujung pada kebiasaan buruk yang merugikan finansial jika tidak digunakan secara bijak.

Agar tidak terjebak dalam ketergantungan *paylater*, berikut beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan.



1. Pastikan bahwa layanan *Paylater* yang digunakan berasal dari lembaga yang resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Kenali Dulu Fungsi *Paylater* *Paylater* seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat darurat atau benar-benar penting, bukan sebagai alat belanja rutin, apalagi untuk barang-barang konsumtif yang

tidak mendesak.

3. Buat Anggaran Belanja Bulanan yang Ketat
Susun anggaran pengeluaran setiap bulan dan alokasikan pos khusus jika memang ingin menggunakan *paylater*.
4. Batasi Jumlah Platform *Paylater*
Hindari mendaftarkan diri di banyak penyedia layanan *paylater* sekaligus. Pilih satu atau dua yang paling relevan dan terjangkau bunganya.
5. Cek dan Bayar Tagihan Tepat Waktu
Selalu cek tagihan secara berkala dan usahakan membayar sebelum jatuh tempo.
6. Evaluasi Pola Konsumsi dan Transaksi
Lakukan evaluasi bulanan terhadap seluruh transaksi *paylater* yang telah dilakukan. Dari situ, kamu bisa melihat apakah mulai tergantung secara psikologis terhadap kemudahan “beli sekarang, bayar nanti”.
7. Gunakan Fitur Kontrol Batas Kredit
Aktifkan fitur control batas kredit agar pengeluaran tidak melebihi batas wajar. Ini adalah langkah pencegahan dini yang cukup efektif.
8. Utamakan Menabung Sebelum Berutang
Tanamkan kebiasaan menabung terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli barang mahal.

Banyaknya pengguna *paylater* mencerminkan kemajuan teknologi finansial sekaligus menjadi peringatan akan gaya hidup konsumtif yang semakin tak terkendali. Terapkan strategi bijak dalam penggunaan *paylater* agar dapat memanfaatkan kemudahan layanan ini tanpa harus terjebak dalam ketergantungan finansial yang merugikan di masa depan.



Isilah barisan garis kosong berikut ini tentang istilah-istilah keuangan menggunakan kode gambar dan angka yang tertera.



CLUE :

19 1 14 4 23 9 3 8 7 5 14 5 18 1 20 9 15 14

18 5 **K** 19 1 4 1 14 1 19 **Y** 1 18 9 1 8

9 14 **V** 5 19 20 1 19 9 19 1 8 1 **M**

1 **U** 20 15 18 5 **J** 5 3 20 9 15 14

20 18 1 4 9 14 7 8 1 **L** 20

D 1 14 1 **P** 5 14 19 9 **U** 14

1 19 **U** 18 1 14 19 9 **J** 9 23 1

Isilah angka yang kosong dengan jawaban yang tepat dan unggah melalui Instagram Story. Jangan lupa mention @Sikapiuangmu

Dapatkan hadiah menarik bagi 3 orang pemenang kuis!

Mengenal Museum Pegadaian di Indonesia

Satu-satunya museum pegadaian yang dimiliki Indonesia terletak di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Museum ini memajang beragam koleksi yang mengingatkan kita akan aktivitas pegadaian di masa silam.



Ternyata aktivitas gadai telah dikenal oleh masyarakat Nusantara sejak masa penjajahan Belanda. Lahirnya sistem pegadaian di Indonesia bermula saat Belanda mendirikan Bank Van Leening di Batavia pada 20 Agustus 1746. Namun, bank dengan sistem pegadaian ini ditutup ketika Inggris mengambil alih Hindia Belanda (1811-1816).

Saat berkuasa kembali, pemerintah Belanda menetapkan bahwa pegadaian dimonopoli oleh pemerintah. Tujuannya agar

lebih melindungi dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Wujud nyata monopoli itu ditandai dengan berdirinya *Pandhuis* (Pegadaian Negara).

Pandhuis pertama didirikan di Jalan Pelabuhan II, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada 1 April 1901. Pada 1 April 2010, bekas Kantor Pegadaian Negara pertama di Hindia Belanda ini diresmikan sebagai satu-satunya museum pegadaian yang dimiliki Indonesia.

Museum ini didirikan dengan

tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan sistem kerja pegadaian di masa lalu. Sebagai satu-satunya Museum Pegadaian yang ada di Indonesia, koleksi Museum Pegadaian Sukabumi tidak hanya berasal dari Pegadaian Sukabumi namun juga benda-benda dari pegadaian lain se-Indonesia, seperti Purwokerto, Yogyakarta, Bantul, dan Temanggung.

Museum ini memajang beragam koleksi yang mengingatkan kita akan aktivitas pegadaian di masa silam. Terdapat meja kasir yang dulu digunakan kasir untuk melayani para nasabah yang akan menerima uang pinjaman maupun yang ingin menebus barang jaminannya. Di atas meja tersebut terdapat timbangan penakar hiasan dan alat hitung.

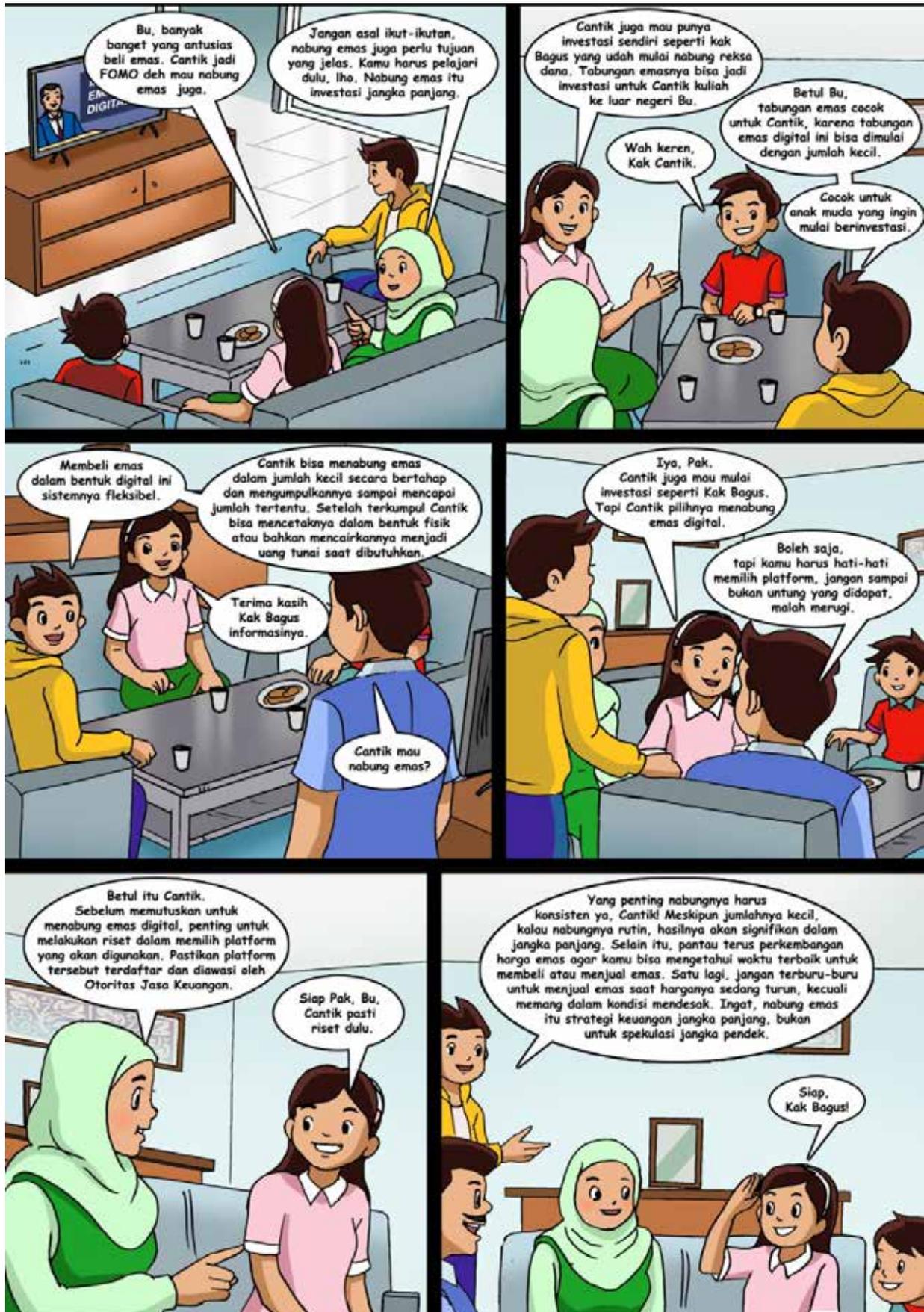
Alat hitung yang digunakan kasir adalah sempoa, alat hitung tradisional yang berasal dari Cina. Sempoa digunakan untuk menghitung kredit, pelunasan, sewa modal, dan untuk membantu dalam pembuatan laporan. Keberadaan sempoa sangat vital sebelum ditemukan alat hitung elektronik.

Di museum ini bisa dilihat alat-alat kerja pegadaian yang digunakan di masa lalu, seperti brankas besi untuk menyimpan uang, buku catatan pegadaian, lemari tempat penyimpanan emas, lemari arsip, sepeda, mesin tik, jam mekanis, dan cap kuno untuk keperluan administrasi.

Juga ada barang-barang jaminan yang disita, mulai dari kain, peralatan dapur, dan benda berharga lainnya.

Jika sedang berada di Kota Sukabumi, tak ada salahnya untuk berkunjung ke Museum Pegadaian ini. Tiket masuknya gratis, buka setiap Senin-Jumat mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Letak museum ini tak terlalu jauh dari Stasiun Kotabumi. Cukup berjalan kaki sejauh 750 meter saja.

Cantik Menabung Emas Digital



YUK, BELAJAR SERU DI **LMSKU!**

Kumpulkan **Poin** pembelajaran dan dapatkan **merchandise** Menarik



► **LMSKU OJK**
 (*Learning Management System* Edukasi Keuangan OJK) merupakan *platform* pembelajaran yang mandiri dan terintegrasi terkait literasi keuangan yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja secara **gratis**.

► CARA MENGAKSES **LMSKU**



**Tutorial
 lebih
 lengkap:**

<https://linktr.ee/lmsku>